



PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG MIMIKA DISTRIK MIMIKA BARAT TAHUN 2025

"Membangun dari Kampung Ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota"



KATA PENGANTAR PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, proses penyusunan **Profil dan Potensi Kampung Mimika Distrik Mimika Barat** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis mendukung akselerasi pembangunan kampung yang berorientasi pada data akurat dan informasi faktual hasil observasi serta pengumpulan data lapangan. Melalui proses yang sistematis, terverifikasi dan partisipatif, dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kampung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Atas nama Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM), kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) atas kepercayaan yang diberikan kepada IPPM sebagai lembaga penyusun. Kepercayaan ini merupakan tanggungjawab besar yang kami emban dalam mendukung pembangunan kampung yang lebih terarah, partisipatif dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik dalam pengumpulan data, mobilisasi ke lapangan, maupun koordinasi lintas pihak. Namun berkat kerja keras tim serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas PMK dan staf, Kepala Distrik Mimika Barat beserta seluruh staf, Kepala Kampung Mimika dan aparat kampung, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi, waktu dan bantuan selama proses pengumpulan data berlangsung. Kontribusi semua pihak menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan dokumen ini.

Kami juga sangat mengharapkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen pada tahap berikutnya. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan kampung di kabupaten Mimika yang lebih maju dan mandiri.

Jayapura, 15 Desember 2025
Direktur IPPM,

Yohannes Rahail

KATA PENGANTAR KEPALA KAMPUNG

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Profil Kampung Mimika ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai upaya bersama Pemerintah Kampung Mimika dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, serta mencerminkan kondisi riil kehidupan masyarakat kampung.

Penyusunan Profil Kampung Mimika bertujuan untuk menggambarkan secara utuh kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi kampung. Profil ini diharapkan menjadi basis data dan rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan kampung, penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung, serta sebagai bahan pendukung dalam musyawarah kampung dan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kabupaten.

Dokumen Profil Kampung ini juga memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan tersedianya data yang valid dan mutakhir, Pemerintah Kampung Mimika dapat merancang program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi kampung.

Saya berharap Profil Kampung Mimika ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kampung. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan kampung yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat Kampung Mimika.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kampung Mimika ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kampung Mimika dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Mimika, 16 Desember 2025
Kepala Kampung Mimika,

Thersisia Umarau

KATA PENGANTAR KEPALA DISTRIK

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, penyertaan, dan tuntunan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Mimika** di wilayah Distrik Mimika Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan kampung yang berbasis pada data dan informasi faktual di lapangan, sehingga setiap perencanaan dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas Pemerintah Kampung, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi riil, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat kampung. Melalui Profil Kampung ini, diharapkan Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki rujukan yang jelas dan komprehensif dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan ke depan.

Atas tersusunnya dokumen ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah bekerja secara profesional sebagai tim penyusun. Dengan metodologi yang terstruktur, berbasis bukti, serta didukung oleh proses pengumpulan data lapangan yang komprehensif, IPPM telah menghasilkan dokumen yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta seluruh masyarakat Kampung Mimika di Distrik Mimika Barat yang telah memberikan dukungan, data, informasi, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan dokumen ini berlangsung.

Semoga Dokumen Profil dan Potensi Kampung Mimika ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan kampung yang mandiri, produktif, dan berkeadilan.

Mimika, 18 Desember 2025
Kepala Distrik Mimika Barat,

Christian Warinussy, S.Sos

SAMBUTAN KEPALA DINAS PMK MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Mimika, Distrik Mimika Barat** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat pembangunan kampung yang berbasis pada data yang akurat, informasi faktual serta pemetaan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta mitra profesional yang berkompeten. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Distrik Mimika Barat beserta jajaran, Kepala Kampung Mimika bersama seluruh aparat kampung, serta masyarakat Kampung Mimika yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan aktif selama proses pengumpulan dan verifikasi lapangan. Kontribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi objektif dan dinamika nyata kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) selaku tim penyusun. Melalui pendekatan metodologis yang terstruktur, IPPM telah melaksanakan proses penyusunan dokumen ini dengan observasi langsung, kajian analitis, serta verifikasi data secara berjenjang. Meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan tantangan lapangan, IPPM mampu menyelesaikan dokumen ini secara baik, akurat dan sesuai dengan kaidah penyusunan profil kampung. Dedikasi tersebut merupakan kontribusi penting dalam mendukung percepatan pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejalan dengan terbitnya dokumen ini, kami berharap penyusunan profil dan potensi kampung dapat diperluas dan direplikasi ke seluruh kampung di Kabupaten Mimika. Dengan tersedianya basis data kampung yang lengkap, mutakhir, dan terpadu, setiap kampung diharapkan mampu berkembang sebagai model perencanaan pembangunan berbasis data, serta menjadi rujukan dalam pengembangan inovasi, penguatan tata kelola pemerintahan kampung, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Dokumen Profil dan Potensi Kampung ini memiliki nilai strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, baik di tingkat kampung, distrik, maupun kabupaten. Data yang lengkap dan komprehensif akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta penguatan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan dapat memperkuat identitas kampung serta membuka ruang pengembangan potensi unggulan yang berdaya saing.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen ini terus diperbarui secara berkala dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Semoga kerja kolaboratif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Kepala Dinas,

Abraham Y. Kateyau, SE., MH



SAMBUTAN BUPATI MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraan dan penyertaan-Nya, Kabupaten Mimika terus berbenah dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan “Membangun dari kampung ke kota”, maka **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Mimika** dapat diselesaikan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang mendasar. Kebijakan Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara lebih kontekstual, partisipatif, serta selaras dengan karakter sosial, budaya dan kondisi geografis masyarakat Papua.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Dokumen strategis ini menegaskan tiga pilar utama pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, sebagai upaya mempercepat transformasi pembangunan Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus menjawab keteringgalan kualitas sumber daya manusia yang bersifat struktural.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, kita menyadari bahwa tantangan pembangunan masih bersifat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan antar wilayah masih nyata, terutama antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dengan kampung-kampung di wilayah pedalaman dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kuatnya peran adat dan tradisi menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi kampung yang akurat, lengkap dan mutakhir. Selama ini, basis data kampung yang terpadu belum sepenuhnya tersedia, sehingga perencanaan pembangunan sering kali belum didukung oleh landasan teknokratis yang kuat. Untuk itu penyusunan profil dan potensi kampung menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai fondasi pembangunan yang objektif, terukur dan berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi pembangunan tahun 2024-2029, “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing menuju Gerbang Emas”, menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dimulai dari kampung dengan pendekatan “Membangun dari Kampung ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota.” Pendekatan ini menempatkan kampung sebagai titik awal pembangunan wilayah, dengan perencanaan yang komprehensif, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Penyusunan profil dan potensi kampung berbasis satu data merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi pendekatan tersebut.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyusunan dokumen ini. Dengan tersusunnya dokumen Profil dan Potensi Kampung Mimika ini, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan kampung secara sistematis, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Data yang tersaji tidak hanya menjadi pijakan perencanaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat identitas kampung, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing kampung secara berkelanjutan.

Akhir kata, saya berharap dokumen ini dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan dan terus diperbarui secara berkala. Semoga upaya ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025

Bupati,

Johannes Rettob, S.Sos., MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar Penyusun	ii
Kata Pengantar Kepala Kampung	iii
Kata Pengantar Kepala Distrik	iv
Sambutan Kepala Dinas PMK	v
Sambutan Bupati Mimika	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
 Bagian I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	3
Bagian II. METODOLOGI	5
Bagian III. PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG	10
A. Keadaan Wilayah Kampung	10
1. Sejarah	10
2. Keadaan Wilayah	16
B. Keadaan Perumahan	21
1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah	21
2. Pola Permukiman	22
3. Kepemilikan Rumah	23
4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar	25
5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga	26
6. Kondisi Lingkungan Permukiman	28
7. Masalah utama dan Kebutuhan perumahan.	30
C. Kependudukan	32
1. Suku-suku di Kampung	32
2. Nilai dan Kearifan Lokal	36
3. Keadaan Penduduk	39
4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk	46
D. Pendidikan	48
1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan	48
2. Kelembagaan Pendidikan	49
E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana	50
1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit	50
2. Kesehatan	52
3. Gizi	53

	4. Keluarga Berencana	55
	F. Ekonomi Masyarakat	56
	1. Aktivitas Penduduk	56
	2. Kepemilikan Modal	58
	3. Kelembagaan Ekonomi	59
	4. Harga Barang dan Bahan Makanan	61
	5. Potensi dan Peluang Ekonomi	63
	6. Tingkat Kesejahteraan	64
	G. Keamanan dan Ketertiban	66
	1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban	66
	2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban	67
	H. Kelembagaan Kampung	68
	1. Lembaga pemerintah	68
	2. Lembaga kemasyarakatan.....	69
	3. Lembaga Politik	70
	I. Sarana Prasana	71
	1. Transportasi dan Komunikasi	71
	2. Air Bersih dan Sanitasi	72
	3. Penerangan / Energi	74
	4. Pendidikan	75
	5. Kesehatan	75
	6. Ekonomi	76
	7. Peribadatan	76
	8. Olahraga dan Rekreasi	77
Bagian IV.	PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG	79
	A. Infrastruktur Kampung Berstandar Kota	79
	B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal	80
	C. SDM, Budaya, dan Lingkungan Berkelanjutan	81
Bagian V.	PENUTUP	84
	Daftar Pustaka	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Kampung Mimika menurut Umur Tahun 2025 ...	41
Tabel 3.2 Distribusi Penduduk Kampung Mimika menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	43
Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Mimika menurut Mata Pencaharian Tahun 2025	44
Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Mimika menurut Agama Tahun 2025	46
Tabel 3.5 Harga Kebutuhan SEMBAKO, Pakaian dan Sekolah Di Kampung Mimika Tahun 2025	62
Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota Di Kampung Mimika	79
Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal Di kampung Mimika	81
Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan Di kampung Mimika	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Titik Lokasi Kampung Mimika	9
Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Mimika.....	68
Gambar 3.2 Struktur BPD Kampung Mimika	69

BAGIAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka kebijakan pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan mendasar. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Papua, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara kontekstual dan partisipatif sesuai karakteristik sosial, budaya dan geografis daerah.

Sebagai kelanjutan dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). RIPPP menekankan tiga (3) pilar utama pembangunan yakni “Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif”. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat transformasi pembangunan yang berpihak pada rakyat Papua secara responsive, menyeluruh dan berkelanjutan, dengan mengatasi ketertinggalan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua yang selama ini terjadi secara struktural dan sistemik.

Di Kabupaten Mimika, tantangan pembangunan masih sangat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tinggi, terutama antara daerah perkotaan yang relatif maju dengan kampung-kampung di pedalaman dan wilayah pinggiran yang masih tertinggal (dataran pesisir dan pegunungan). Kondisi geografis yang sulit, rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur, dan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap norma-norma adat dan tradisi lokal turut mempengaruhi lambatnya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat bergantung pada kemampuan memahami potensi dan permasalahan kampung secara lebih mendalam, faktual dan berbasis data yang akurat. Namun hingga saat ini belum tersedia satu basis data kampung yang lengkap, terpadu dan terbarukan yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan kampung secara objektif, terukur dan berkelanjutan.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi-misi pembangunan tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Mimika yang responsif, energik, transparan, terampil, objektif dan berdaya saing menuju Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera), telah menetapkan arah kebijakan “Membangun dari Kampung ke Kota”, dengan pendekatan “Membangun Kampung Rasa Kota”. Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan yang berbasis wilayah, komprehensif, partisipatif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi pendekatan tersebut adalah menyusun profil dan potensi kampung berbasis kontekstual kampung di kabupaten Mimika.

Dengan adanya basis data kampung yang komprehensif dan selalu diperbarui, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyelenggarakan pembangunan kampung secara lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan. Data ini berfungsi sebagai pijakan teknokratis yang kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi antar-lembaga serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat kampung dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil dan potensi lokal.

Selanjutnya, basis data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media *branding* kampung, sehingga tiap wilayah memiliki ruang untuk menonjolkan keunikan dan potensi khasnya baik dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan kampung di Kabupaten Mimika tidak hanya sebatas upaya pemerataan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing lokal yang berakar pada identitas masing-masing kampung.

Melalui kegiatan penyusunan profil dan potensi kampung yang terintegrasi dalam basis data tersebut, diharapkan terbangun pijakan yang kokoh menuju terwujudnya kampung yang mandiri, produktif dan berdaya saing. Upaya ini merupakan bagian dari gerakan besar untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai “Gerbang Emas”, yakni kabupaten yang sehat, cerdas dan sejahtera, dengan masyarakat serta keluarga yang berkualitas.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini, adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan kondisi riil kampung secara menyeluruh, mencakup aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur;
2. Menggali potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi dan daya saing kampung;
3. Menyediakan data dasar yang akurat dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan kampung;
4. Menjadi fondasi untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung.

C. Manfaat

Penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah
 - a. Penyediaan data akurat dan terpadu berbasis kampung
Memberikan basis data yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan program pembangunan kampung secara obyektif dan terukur.
 - b. Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran
Memungkinkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat kampung berdasarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.
 - c. Penguatan tata kelola pemerintahan kampung
Meningkatkan kapasitas pemerintah kampung dan distrik dalam menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan transparan berbasis data
 - d. Mempercepat pelaksanaan program strategis daerah dan nasional
Mendukung pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2030 (Gerbang Emas) serta program nasional seperti RIPPP (Papua sehat, cerdas dan produktif) melalui intervensi yang berbasis data dan spasial.
 - e. Mendukung sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis bukti

Menyediakan alat ukur dan indikator yang valid untuk memantau capaian pembangunan kampung secara berkala dan berkelanjutan.

2. Masyarakat

a. Peningkatan akses terhadap program dan layanan publik

Masyarakat akan lebih mudah teridentifikasi dan terakomodasi dalam program pembangunan karena pemerintah memiliki data yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan mereka.

b. Pemberdayaan berbasis potensi lokal

Masyarakat akan lebih terdorong mengembangkan potensi kampung (SDA, budaya dan ekonomi lokal) sebagai basis pemberdayaan dan kemandirian.

c. Partisipasi aktif dalam pembangunan

Dengan keterlibatan langsung dalam proses pendataan dan pemetaan, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan yang dilakukan.

d. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung

Data yang terbuka dan mudah diakses akan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat bagi proses pembangunan dan mendorong kontrol sosial yang sehat.

e. Percepatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup

Dengan adanya intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, masyarakat akan memperoleh manfaat nyata seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

BAGIAN II. METODOLOGI

Metodologi penyusunan Profil Kampung Mimika dirancang untuk menjamin bahwa data dan informasi yang dihasilkan bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kampung, distrik dan kabupaten. Pendekatan metodologis ini mengacu pada prinsip perencanaan pembangunan berbasis data, partisipasi masyarakat dan sinkronisasi lintas sektor sesuai kerangka perencanaan Pemerintah Kabupaten Mimika.

A. Pendekatan dan Metode Penyusunan

Penyusunan Profil Kampung Mimika menggunakan metode deskriptif dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi riil kampung, baik dari sisi data objektif maupun dinamika sosial, budaya, kelembagaan, serta potensi sumber daya lokal.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan aktif aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda serta unsur masyarakat lainnya. Pelibatan ini dilakukan dalam proses pengumpulan, klarifikasi dan pembahasan data agar profil kampung mencerminkan kondisi riil dan aspirasi masyarakat.

2. Pendekatan berbasis data primer dan sekunder

Penyusunan profil kampung memadukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah kampung, distrik dan perangkat daerah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kelengkapan, ketepatan serta konsistensi data.

3. Validasi melalui FGD Kampung

Seluruh data dan informasi yang dihimpun dilakukan proses validasi melalui FGD tingkat kampung sebagai forum klarifikasi, penyepakatan dan penguatan legitimasi data secara sosial dan administratif.

B. Prinsip Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Mimika dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Spesifik, yaitu data yang dihimpun mampu menggambarkan indikator pembangunan kampung secara jelas dan terarah sesuai konteks lokal.
2. Dapat dipercaya, yaitu seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur agar mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Dapat diukur, yaitu data disusun berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi, dan satuan ukuran yang merujuk pada standar yang diakui sehingga memungkinkan perbandingan antar waktu.
4. Relevan, yaitu data yang dikumpulkan memiliki nilai guna langsung bagi perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan kampung.
5. Berkelanjutan, yaitu data disusun dengan prinsip pemutakhiran berkala agar Profil Kampung selalu mencerminkan kondisi aktual.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Kampung Mimika meliputi:

1. Data administrasi kampung, antara lain data kependudukan, kelembagaan kampung, sarana dan prasarana, serta dokumen perencanaan dan laporan kampung.
2. Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dari:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
 - b. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
 - c. Data statistik wilayah Kabupaten Mimika dan Distrik Mimika Barat.
3. Observasi lapangan dan wawancara narasumber kunci, yang digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan serta potensi dan permasalahan kampung yang belum sepenuhnya tercakup dalam data administratif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Data sekunder

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Mimika dilaksanakan dengan memanfaatkan data sekunder resmi yang telah tersedia dan terpublikasi resmi, khususnya untuk kebutuhan data dasar kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan Data Agregat Kependudukan Semester- I Tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika. Data tersebut digunakan untuk menghimpun informasi mengenai jumlah dan struktur penduduk, karakteristik sosial dasar, tingkat pendidikan, serta indikator kependudukan lainnya yang relevan dengan kebutuhan penyusunan profil kampung.

Pemanfaatan data sekunder resmi ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan dan belum optimalnya validitas data hasil pendataan langsung di lapangan. Untuk itu penggunaan data agregat Dukcapil dipandang sebagai sumber data yang paling andal, terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam mendukung penyusunan Profil Kampung Mimika.

2. Data primer

- a. Wawancara Mendalam, yang ditujukan kepada informan kunci seperti aparat kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan unsur pemerintah kampung dan perwakilan masyarakat untuk menggali informasi kualitatif, mengidentifikasi isu strategis, serta merumuskan potensi dan kebutuhan prioritas kampung.

Setelah pengumpulan data sekunder dan primer, dilakukan verifikasi silang data sebagai proses pencocokan dan pengecekan data antar sumber, baik antara data lapangan dan data administratif maupun antar OPD, guna memastikan konsistensi dan keandalan data.

E. Teknik Analisis Data

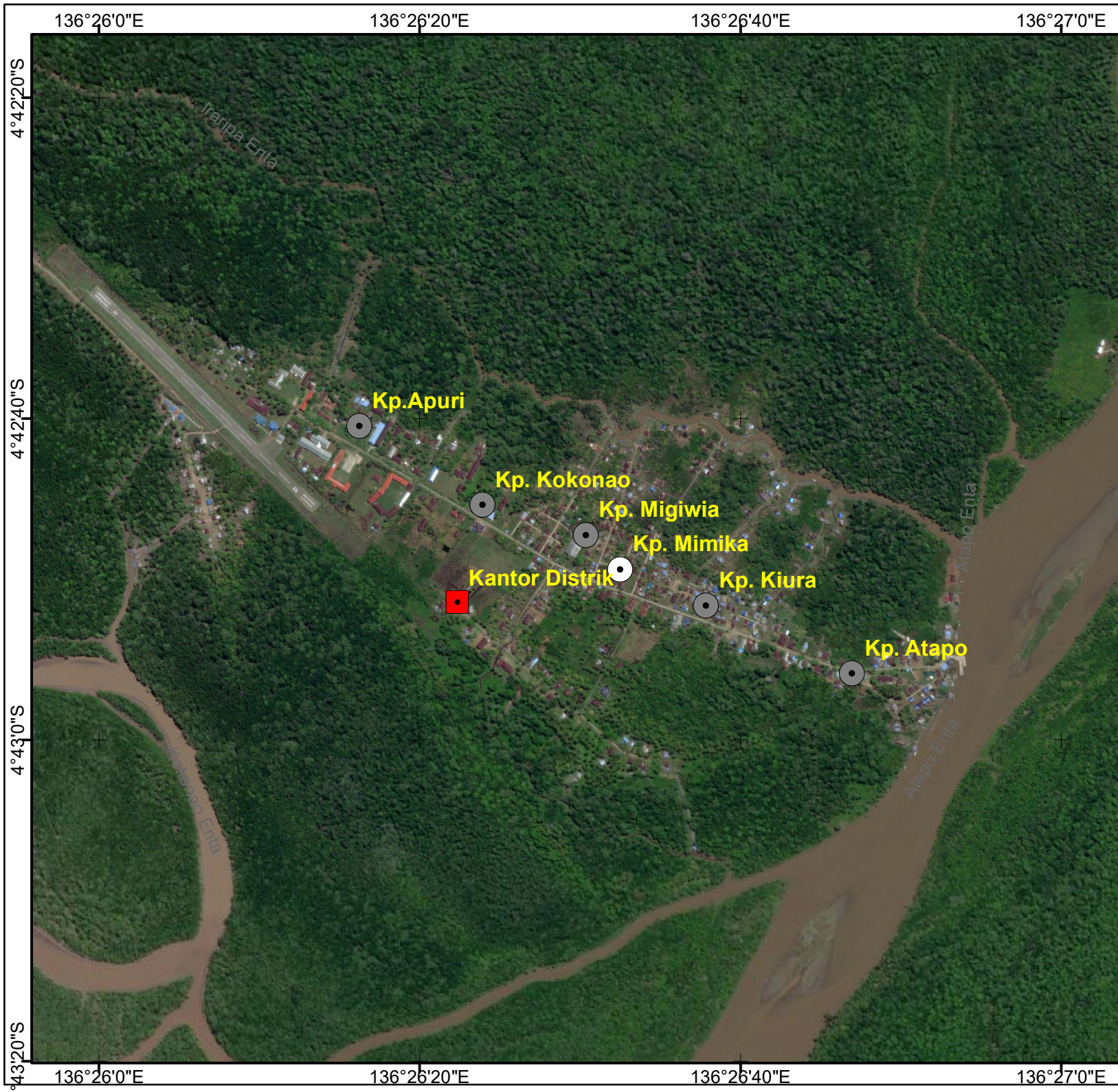
Analisis data dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai kondisi Kampung Mimika.

Data kuantitatif dianalisis melalui tabulasi dan pengelompokan indikator pembangunan sehingga dapat menggambarkan distribusi, kecenderungan, dan proporsi setiap variabel secara terukur. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan penafsiran untuk menangkap makna, dinamika sosial, serta konteks lokal yang melatarbelakangi data numerik.

F. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Penyusunan Profil Kampung Mimika dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2025, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan dan validasi, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan dokumen profil kampung.

Wilayah cakupan penyusunan meliputi wilayah Kampung Mimika, Distrik Mimika Barat, termasuk kawasan permukiman, wilayah pesisir, serta area aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kampung.



INSTITUT PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA

**PETA TITIK LOKASI
KAMPUNG MIMIKA
DISTRIK MIMIKA BARAT
KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**



Skala 1:10.000



Keterangan :

X : 136° 26' 31,870" E

Y : 4° 42' 49,647" S

● Titik Kampung

● Titik Kampung Lain

■ Kantor Distrik

Datum : WGS 1984

Proyeksi : UTM Zona 54 S

Sistem Kordinat : Geografis dan UTM

Sumber : Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

Inset Peta



□ Lokasi Pemetaan

BAGIAN III. PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG

A. Keadaan Wilayah Kampung

1. Sejarah

a. Asal-usul kampung

Kampung Mimika tergolong sebagai kampung yang baru terbentuk. Nenek moyang masyarakat Kampung Mimika sebelumnya hidup dan bermukim di Wakatimi, sebuah wilayah di bagian hulu Sungai Mimika. Pada suatu masa terjadi banjir besar di Wakatimi sehingga warga terpaksa mengungsi ke wilayah pesisir dekat muara Sungai Mimika, yaitu Namimapu, sementara sebagian lainnya berpindah ke Maniaripi. Perpindahan masyarakat dari Wakatimi ke pesisir Namimapu terjadi sebagai respon terhadap bencana banjir besar yang melanda permukiman mereka di hulu Sungai Mimika. Dalam perjalanan berikutnya, para leluhur masyarakat Mimika mencari lokasi permukiman baru di Tamanipia, yang kini dikenal sebagai Kampung Kokonao. Di tempat inilah mereka menetap hingga tumbuh menjadi sebuah kampung yang kemudian dinamai Kampung Kokonao dan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Fak-Fak, sebelum Mimika berdiri sebagai kabupaten tersendiri.

Pada tahun 1991 dilakukan pemekaran Kampung Kokonao menjadi empat kampung, yaitu Kampung Kokonao, Kampung Migiwiya, Kampung Kiyura, dan Kampung Mimika yang selanjutnya menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Mimika. Sejak pemekaran tersebut, Kampung Mimika pertama kali dipimpin oleh Bapak Benidiktus Kareyau sebagai kepala kampung hingga tahun 2014, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Urbanus Akiriwapea dari tahun 2014 dan saat ini Kampung Mimika dipimpin oleh Ibu Thersisia Umarau.



Tugu kampung Mimika (dok.ippm)

Asal-usul penamaan Kampung Mimika berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ketika para leluhur masyarakat Mimika sedang mencari lokasi permukiman baru di Tamanipia, mereka berjumpa dengan tentara Portugis yang tengah berlabuh di muara Sungai Atapo pada saat kondisi sungai sedang banjir. Para tentara Portugis kemudian menanyakan kepada masyarakat nama sungai yang mereka kunjungi, namun karena perbedaan bahasa, pertanyaan itu tidak dipahami dengan baik. Masyarakat lalu menjawab menggunakan bahasa Kamoro, “Mumuaika”, yang berarti busa atau buih banjir, sambil menunjuk ke arah air sungai yang sedang meluap. Orang-orang Portugis tersebut mengira jawaban itu adalah nama tempat, sehingga menyebut wilayah tersebut sebagai Mumuika yang dalam pelafalan mereka menjadi “Mimieka”. Seiring waktu, sebutan Mimieka berubah menjadi Mimika dan akhirnya dipakai sebagai nama Kampung Mimika.

b. Struktur sosial awal

Struktur sosial awal Kampung Mimika bertumpu pada marga-marga perintis yang menjadi dasar pembentukan komunitas sekaligus menentukan pola kekerabatan. Marga atau klan ini bukan hanya penanda garis keturunan, tetapi juga mengatur hak atas tanah adat (ulayat), pembagian wilayah hunian, serta posisi peran sosial dalam kampung. Dalam konteks masyarakat Kamoro di Mimika, hubungan kekerabatan umumnya terjalin erat melalui ikatan darah, perkawinan antarmarga, dan jaringan affinal yang kemudian membentuk kelompok-kelompok keluarga besar. Pola kekerabatan ini berpengaruh pada pengambilan keputusan adat, pewarisan lahan, serta solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam struktur sosial awal, kehidupan masyarakat diatur oleh kepemimpinan adat yang berlapis, mulai dari kepala suku, hingga tokoh agama. Kepala suku berperan sebagai pemimpin utama yang mengatur tanah ulayat, menyelesaikan sengketa antarkelompok, dan menjadi rujukan dalam setiap keputusan penting yang menyangkut komunitas. Di bawah mereka, setiap marga memimpin keluarga-keluarga besar, menjaga hubungan kekerabatan, serta mengorganisir gotong royong dalam kegiatan adat maupun kerja sehari-hari. Tokoh agama kemudian hadir memperkuat nilai moral dan spiritual masyarakat, memediasi perubahan sosial ketika pendidikan dan pelayanan keagamaan mulai berkembang, sehingga tercipta

keseimbangan antara aturan adat dan ajaran agama dalam kehidupan warga Kampung Mimika. Adapun kepala suku pertama di kampung Mimika adalah Bapak Yakopeusa lalu dilanjutkan Bapak Bakoyeusa. Saat ini yang menjadi kepala suku di Mimika adalah Germanus Wayaru.

Pola permukiman tradisional masyarakat di wilayah Kampung Mimika pada mulanya sangat erat dengan bentang alam pesisir, sungai, dan kawasan hutan bakau. Rumah-rumah dibangun mengikuti alur sungai dan garis pantai, sehingga memudahkan akses ke laut, muara dan hutan mangrove yang menjadi ruang hidup utama masyarakat. Pola hunian cenderung memanjang di tepi perairan dengan jarak yang dekat ke tempat berlabuh perahu, area penangkapan ikan, serta jalur mobilitas harian. Dalam sistem hidup awal, sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan sebagai nelayan yang menangkap ikan dan biota lainnya di laut, sungai, dan hutan bakau. Selain itu, banyak warga yang juga melakukan kegiatan berburu babi, kasuari, dan satwa lain di hutan, serta memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan rawa sebagai penopang pangan keluarga. Pola hidup ini membentuk ritme harian yang dinamis antara pergi melaut atau menyusuri sungai dan mangrove, lalu kembali ke permukiman untuk mengolah hasil tangkapan dan buruan bersama keluarga.

c. Perkembangan kampung dari masa ke masa

Seiring berjalannya waktu, kapasitas penduduk Kampung Mimika mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan alami dan perpindahan penduduk dari kampung-kampung sekitar di wilayah pesisir dan hulu. Jumlah penduduk di Distrik Mimika Barat sendiri menunjukkan tren bertambah dari tahun ke tahun, yang tercermin dalam kepadatan dan sebaran penduduk di kampung-kampung seperti Kokonao, Migiwiya, Kiyura dan Mimika. Pertumbuhan penduduk ini berjalan beriringan dengan perubahan budaya, dari pola hidup tradisional yang sangat bergantung pada laut, sungai, dan hutan menuju cara hidup yang makin dipengaruhi pendidikan formal, agama, ekonomi uang dan arus migrasi antar kampung. Masuknya sekolah, gereja, berbagai program pemerintah dan interaksi dengan pendatang membuat praktik adat tertentu bertransformasi, namun pada saat

yang sama mendorong lahirnya identitas baru masyarakat Mimika yang memadukan nilai-nilai Kamoro/Mimika Wee dengan tuntutan kehidupan modern.

Pengaruh eksternal terhadap perkembangan Kampung Mimika tampak kuat melalui kehadiran misi gereja, kekuatan kolonial, dan kemudian pemerintah. Sejak akhir 1920-an, Kokonao muncul sebagai pusat misi Katolik dan pendidikan di wilayah Mimika, menjadi pintu masuk guru, pastor, dan lembaga gereja yang membawa sekolah, layanan kesehatan dasar, serta pola pengajaran baru bagi anak-anak dan orang muda. Pada masa berikutnya, Kokonao juga berfungsi sebagai pusat perwakilan pemerintahan Belanda dan kemudian menjadi titik awal hadirnya struktur pemerintahan modern di kawasan pesisir Mimika, yang kelak dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia melalui pembentukan Kabupaten Mimika dan distrik-distrik di dalamnya. Campur tangan negara lewat pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program pembangunan sosial-ekonomi ikut mengubah pola hidup tradisional masyarakat Kampung Mimika, meskipun nilai adat dan identitas lokal tetap berusaha dipertahankan di tengah arus perubahan tersebut.

Dalam perjalanan sejarahnya, Kampung Mimika mengalami sejumlah peristiwa penting yang ikut membentuk wajah kampung hingga sekarang. Relokasi permukiman dari wilayah hulu seperti Wakatimi ke pesisir, kemudian ke Tamanipia/Kokonao dan akhirnya pemekaran menjadi kampung-kampung baru, menandai perubahan besar dalam pola hunian dan tata ruang sosial masyarakat. Seiring itu, berbagai intervensi eksternal turut memberi warna, mulai dari kehadiran pusat pemerintahan kolonial dan misi pendidikan di Kokonao, hingga pembangunan fasilitas publik modern seperti sekolah, gereja, bandara perintis, kantor distrik, sarana air bersih dan infrastruktur lainnya melalui berbagai proyek pemerintah. Berbagai dinamika termasuk ketegangan sosial, konflik kepentingan atas tanah dan sumber daya, maupun proses pemekaran wilayah dan kampung mendorong lahirnya mekanisme baru dalam pengelolaan kampung yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.

Transformasi ekonomi di Kampung Mimika berlangsung bertahap, dari pola hidup subsisten yang bergantung pada hasil laut, sungai, hutan bakau, dan kebun

tradisional menuju ekonomi campuran yang mulai mengenal pertanian komersial, perdagangan, dan berbagai bentuk jasa. Masyarakat yang semula memanfaatkan ikan, udang, kepiting, sagu, dan hasil buruan terutama untuk konsumsi keluarga, perlahan terdorong menjual sebagian hasil tangkapan dan panen ke pasar lokal dan pedagang perantara. Masuknya program pemerintah, lembaga gereja, dan perusahaan (termasuk pelatihan, bantuan alat tangkap, dukungan pertanian, dan penguatan koperasi) ikut membuka peluang usaha baru, seperti usaha perikanan skala kecil, lapak penjualan pinang, transportasi perahu, jasa buruh, serta aktivitas jasa lain yang terhubung dengan pusat kota Timika. Hal ini membuat sumber penghasilan rumah tangga di Kampung Mimika kini tidak lagi tunggal, melainkan kombinasi antara bertani, berkebun, menangkap ikan, berdagang, dan bekerja di sektor jasa, meskipun ketergantungan pada sumber daya alam pesisir dan rawa masih tetap kuat.

d. Nilai dan kearifan lokal

Dalam kehidupan masyarakat Kampung Mimika, norma adat menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan antarkelompok, pembagian tanah ulayat, serta tata cara pemanfaatan sumber daya alam. Berbagai ritual budaya seperti upacara pendewasaan (misalnya *karapao/karapauw*), pesta adat, tipa duduk, dan penghormatan kepada leluhur berfungsi untuk meneguhkan identitas kolektif sekaligus menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Struktur kepemimpinan tradisional tersusun dari kepala suku, ketua taparu/marga, dan dewan adat yang bekerja bersama dalam proses musyawarah ketika mengatur wilayah, menyelesaikan konflik, serta mengelola ritus adat di kampung. Dalam perkembangannya, lembaga adat ikut memperkuat posisi pemimpin adat dengan menjadi penghubung antara masyarakat, gereja dan pemerintah, sehingga nilai dan kearifan lokal tetap menjadi rujukan penting di tengah perubahan sosial yang terjadi di Kampung Mimika.

Tokoh adat dan agamawan di Kampung Mimika memegang peran sentral dalam menjaga kohesi sosial dan mengarahkan perkembangan komunitas. Para kepala suku, dewan adat, dan ketua taparu menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik, penetapan keputusan penting, serta perlindungan hak ulayat

dan ruang hidup masyarakat, sementara lembaga adat Kamoro/Mimika Wee memperkuat posisi mereka sebagai penjaga identitas dan hak-hak masyarakat adat di tengah perubahan zaman. Di sisi lain, para tokoh agama khususnya dari gereja-gereja yang berkembang sejak Kokonao menjadi pusat misi berperan besar dalam pendidikan, pendampingan sosial, dan pembinaan moral generasi muda, sehingga nilai-nilai iman berjalan beriringan dengan adat lokal. Melalui kerjasama antara pemimpin adat dan pemimpin agama, berbagai persoalan sosial, perubahan budaya, serta masuknya program pembangunan baru diupayakan tetap selaras dengan kearifan lokal dan martabat masyarakat Kampung Mimika.

Sistem kearifan tradisional di Kampung Mimika tampak jelas dalam cara masyarakat mengatur tanah ulayat, mengelola sungai dan hutan, serta mempraktikkan solidaritas sosial melalui gotong-royong. Hak ulayat biasanya melekat pada marga atau taparu tertentu, dengan batas-batas wilayah yang mengikuti aliran sungai, garis pantai, dan kawasan hutan sagu atau mangrove, sehingga setiap kelompok memiliki tanggung jawab adat atas penjagaan dan pemanfaatan ruang hidupnya. Dalam pengelolaan sungai dan hutan, masyarakat menerapkan pengetahuan lokal tentang musim, zona penangkapan, dan area larangan, termasuk cara mengambil hasil hutan dan sumber pangan (seperti sagu, ikan, udang, keraka dan satwa buruan) tanpa merusak keseimbangan alam. Di tingkat sosial, kearifan ini diperkuat oleh praktik gotong royong dalam membangun rumah, mengadakan pesta adat, bekerja di dusun/kebun atau di laut, serta saling membantu saat ada duka dan bencana, sehingga rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama tetap terpelihara di Kampung Mimika.

e. Identitas kampung saat ini

Identitas masyarakat Kampung Mimika saat ini kuat tercermin melalui bahasa, seni tari, makanan tradisional, dan simbol-simbol budaya yang masih hidup dalam keseharian. Masyarakat setempat merupakan bagian dari Suku Kamoro/Mimika Wee, dengan bahasa Kamoro sebagai salah satu penanda utama identitas, meskipun penggunaan bahasa Indonesia kian menguat terutama di kalangan muda dan dalam konteks formal. Dalam ranah budaya, berbagai tarian adat seperti Tari Seka, Tari Ikan, dan tarian-tarian lain yang berkembang di pesisir

Mimika menjadi media ekspresi syukur, penghormatan kepada leluhur, serta pengikat kebersamaan warga kampung. Makanan tradisional yang berbasis sagu, ikan, hasil sungai, dan mangrove seperti olahan sagu tindis/amamaihi, tambelo, ulat sagu, karaka, dan aneka ikan bakar bersama dengan ukiran kayu, tifa, dan atribut pakaian adat (ikat kepala, ornamen tubuh) menjadi simbol budaya yang menandai kekhasan Kampung Mimika di tengah perubahan zaman.

Arah perkembangan terbaru yang membentuk karakter Kampung Mimika saat ini bergerak pada tiga poros utama: penguatan pelayanan dasar, peningkatan ekonomi lokal, dan revitalisasi identitas adat-budaya. Pemerintah Kabupaten Mimika memprioritaskan pengembangan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan UMKM di wilayah pesisir seperti Distrik Mimika Barat, sehingga akses jalan, layanan sekolah, fasilitas kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi perlahan makin dekat dengan warga kampung. Pada saat yang sama, muncul berbagai inisiatif untuk menghidupkan kembali peran kota tua Kokonao dan kampung-kampung Kamoro/Mimika Wee sebagai pusat budaya dan sejarah, termasuk melalui kegiatan adat, pelatihan pangan lokal, forum lembaga adat, dan pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Kombinasi antara dorongan pembangunan modern dan upaya menguatkan kembali adat serta identitas Mimika Wee inilah yang kini membentuk karakter Kampung Mimika sebagai kampung pesisir yang sedang berproses menjadi lebih maju tanpa melepaskan akar budayanya.



Acara adat pendewasaan anak (dok.ippm)

2. Keadaan Wilayah

a. Letak geografis

Kampung Mimika merupakan salah satu kampung di Distrik Mimika Barat, dengan pusat permukiman berada di kawasan pesisir. Permukiman ini berdekatan dan berbatasan langsung dengan Kampung Kiyura dan Kampung Migiwia yang juga berada dalam distrik yang sama.

Secara geografis, Kampung Mimika berada di wilayah pesisir selatan Kabupaten Mimika, dalam lingkup koordinat kabupaten sekitar 134°31'–138°31' BT dan 4°60'–5°18' LS.

Adapun batas administrasi wilayah Kampung Mimika adalah:

- Utara berbatasan dengan Kampung Aparuka/Kapare
- Selatan berbatasan dengan Laut Arafura
- Timur berbatasan dengan Kampung Kiyura
- Barat berbatasan dengan Kampung Migiwia

Akses ke Kampung Mimika dari Pelabuhan Pomako dapat ditempuh menggunakan *speedboat* atau perahu bermotor selama kurang lebih 2-3 jam melalui jalur sungai maupun laut. Alternatif lainnya, perjalanan dapat dilakukan dengan pesawat jenis Caravan dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Bandar Udara Kokonao dengan waktu tempuh sekitar 20 menit, kemudian dilanjutkan ke kampung.

b. Luas wilayah dan pembagian zona

Kampung Mimika memiliki luas wilayah sekitar 4 hektar berdasarkan data administrasi kampung/Distrik Mimika Barat. Zona ruang di Kampung Mimika secara umum terbagi atas kawasan permukiman, lahan usaha, hutan, perairan, rawa, dan tanah ulayat yang saling terkait satu sama lain. Permukiman utama berada di tepi pesisir dan alur sungai, sedangkan lahan kebun, dusun sagu, serta kawasan hutan berada sedikit menjauh ke bagian dalam yang lebih tinggi atau di sekitar rawa yang masih dapat dijangkau dengan perahu maupun berjalan kaki.

Wilayah perairan dan rawa termasuk sungai, muara, hutan mangrove, dan daerah pasang surut menjadi zona penting untuk aktivitas penangkapan ikan, kepiting/karaka, udang, dan pengumpulan hasil hutan bakau, sementara tanah ulayat masing-masing marga membentang meliputi kombinasi area hutan, dusun/kebun sagu, dan sebagian kawasan perairan. Pembagian zona ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga diatur oleh aturan adat mengenai siapa yang berhak memanfaatkan, kapan boleh mengambil hasil, dan bagaimana menjaga kelestariannya.

Penggunaan lahan di Kampung Mimika didominasi oleh kawasan perumahan yang memanjang mengikuti garis pesisir dan alur sungai, sehingga rumah-rumah

warga umumnya dekat dengan dermaga kecil atau tempat berlabuh perahu. Di belakang atau sisi permukiman, terdapat lahan kebun keluarga berupa petakan buatan berukuran sekitar dua kali dua meter yang ditanami tanaman sayuran dan bumbu dapur dan dusun sagu yang menjadi sumber pangan utama, diselingi area rawa dan hutan yang masih dimanfaatkan untuk berburu dan mencari hasil hutan non kayu. Fasilitas umum seperti balai kampung, kantor pemerintahan, posyandu atau fasilitas kesehatan sederhana biasanya ditempatkan di titik-titik yang mudah diakses oleh warga dari berbagai arah permukiman. Tempat ibadah gereja sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial sering kali menjadi simpul ruang sosial kampung, di mana halaman gereja dan lapangan di sekitarnya dipakai untuk kegiatan olahraga, pertemuan adat, perayaan keagamaan, serta acara-acara kampung lainnya walaupun keberadaan gereja tidak ada di kampung ini.

c. Kondisi topografi dan geomorfologi

Secara topografi, Kampung Mimika berada pada kawasan dataran rendah pesisir yang ditandai oleh kombinasi lahan rawa, dataran aluvial, dan jalur sungai yang bermuara ke Laut Arafura. Wilayah ini merupakan bagian dari bentang alam pesisir selatan Kabupaten Mimika yang didominasi dataran pantai, rawa-rawa, dan estuaria dengan kemiringan lereng sangat landai, umumnya kurang dari 2 persen dan berada hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Di sekitar kampung terbentang ekosistem mangrove yang tebal di sepanjang garis pantai, kawasan rawa tergenang di peralihan antara hutan tropis dan hutan bakau, serta jaringan sungai dan anak sungai yang menjadi urat nadi transportasi dan sumber penghidupan masyarakat. Tidak terdapat perbukitan atau danau besar di sekitar Kampung Mimika. Karakter wilayah lebih ditandai oleh dataran pesisir yang lembek, rawa pasang surut, dan alur sungai yang terus dipengaruhi dinamika pasang surut Laut Arafura.

Kemiringan lahan di wilayah Kampung Mimika pada umumnya sangat landai karena berada di zona dataran rendah pesisir dan rawa aluvial di selatan Kabupaten Mimika. Hampir seluruh permukaan wilayah memiliki lereng 0-2 persen, sehingga tampak datar dengan variasi kecil pada gundukan tanah di sekitar tepian sungai atau tanggul alam. Dari sisi ketinggian, kawasan pesisir Mimika Barat tempat Kampung

Mimika berada hanya berada pada elevasi beberapa meter di atas permukaan laut, dengan sebagian area rawa dan mangrove kerap tergenang saat pasang tinggi. Kondisi ketinggian yang rendah ini menjadikan kampung cukup peka terhadap perubahan pasang surut air laut dan potensi genangan ketika curah hujan tinggi bersamaan dengan pasang..

Kampung Mimika sebagai kampung pesisir di selatan Kabupaten Mimika memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi, terutama terkait banjir dan



gelombang pasang. Posisi kampung yang berada di dataran rendah dekat muara sungai dan Laut Arafura membuat wilayah ini rentan terhadap banjir rob ketika pasang laut naik, seperti yang beberapa kali terjadi di kampung-kampung pesisir Mimika

termasuk Kokonao dan sekitarnya. Selain banjir rob, ancaman abrasi juga muncul akibat hantaman gelombang dan perubahan garis pantai yang perlahan menggerus tepi daratan dan kawasan mangrove. Meski risiko longsor relatif kecil karena wilayah Kampung Mimika didominasi dataran rendah tanpa lereng curam, kombinasi curah hujan tinggi, pasang besar, dan penurunan kualitas vegetasi pantai dapat meningkatkan frekuensi genangan, kerusakan permukiman, dan infrastruktur di sekitar pesisir kampung.

d. Iklim dan kondisi alam

Kampung Mimika berada pada zona pesisir yang memiliki tipe iklim tropis basah hingga sangat basah, dengan pola musim yang relatif mirip dengan kampung-kampung lain di Distrik Mimika Barat. Dalam satu tahun, wilayah ini hanya mengenal dua musim utama, yaitu musim kemarau yang umumnya berlangsung pada Januari hingga Mei, serta musim hujan yang terjadi mulai Juni hingga Desember. Tingginya kelembapan udara dan curah hujan yang merata sepanjang tahun menciptakan lingkungan yang selalu basah dan mendukung tumbuhnya berbagai ekosistem khas pesisir Papua. Berdasarkan pengamatan iklim wilayah pesisir Mimika, rata-rata curah hujan tahunan berada pada kisaran ± 500 mm per

bulan, dengan suhu udara relatif stabil antara 22-30°C. Kondisi ini menjadikan kampung Mimika sebagai wilayah yang memiliki produktivitas ekologis tinggi, baik di daratan maupun di kawasan perairan.

Musim ekstrem yang terjadi di Kampung Mimika juga dipengaruhi oleh karakter ekologis pesisir dan keberadaan sungai-sungai besar yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Pada puncak musim hujan, wilayah ini sering mengalami banjir genangan, terutama di area rawa, permukiman rendah, serta kawasan yang berdekatan dengan aliran Sungai Mimika dan Sungai Kapare. Luapan air biasanya diperparah oleh pasang tinggi dan angin kencang yang umum terjadi pada periode pertengahan hingga akhir tahun. Sementara itu, pada masa peralihan musim, angin dari arah laut dapat bertiup cukup kuat sehingga mempengaruhi aktivitas melaut dan mobilitas masyarakat yang bergantung pada transportasi sungai. Pola perubahan cuaca ekstrem ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat kampung Mimika dan telah membentuk cara mereka beradaptasi terhadap lingkungan, baik melalui penentuan lokasi permukiman maupun pola pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi iklim yang lembap dan sangat basah ini secara langsung mendukung keberadaan sumber daya alam yang menjadi ciri utama Kampung Mimika.

Hutan sagu tumbuh subur di wilayah rawa-rawa, menyediakan bahan pangan utama sekaligus penopang budaya masyarakat. Kawasan mangrove yang luas berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, tempat mencari kepiting bakau, kerang dan tambelo, serta menjadi ekosistem penting bagi keberlanjutan perikanan lokal. Sungai-sungai besar yang mengalir di sekitar kampung tidak hanya menjadi jalur transportasi tradisional, tetapi juga menjadi sumber perikanan air tawar yang kaya, seperti ikan, udang dan berbagai biota sungai lainnya. Kombinasi iklim basah, curah hujan tinggi, serta keberadaan ekosistem pesisir yang lengkap menjadikan Kampung Mimika sebagai wilayah dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Sumber daya alam yang mendominasi lingkungan Kampung Mimika adalah hutan sagu, hutan mangrove, jaringan sungai besar dan kecil, serta potensi perikanan pesisir dan muara. Di kiri kanan alur sungai dan rawa dataran rendah

terbentang dusun-dusun sagu yang menjadi lumbung pangan utama masyarakat, sementara ke arah pesisir, hamparan hutan mangrove yang luas menyediakan kayu, bahan bangunan, kepiting, kerang, tambelo, dan berbagai biota lain yang menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Sungai-sungai yang bermuara ke Laut Arafura membawa sedimen dan nutrisi yang memperkaya perairan pesisir, sehingga wilayah ini menjadi salah satu area penting bagi perikanan, baik untuk kebutuhan nelayan kampung maupun skala yang lebih luas. Perairan pesisir Mimika dan Laut Arafura di depannya dikenal kaya akan ikan, udang, dan biota demersal, sehingga kombinasi hutan sagu, mangrove, sungai, dan perikanan menjadikan Kampung Mimika memiliki basis sumber daya alam yang sangat potensial untuk mendukung ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat.

B. Keadaan Perumahan

1. Tipe dan kondisi bangunan rumah

Tipe bangunan rumah di Kampung Mimika pada dasarnya seragam sebagai rumah panggung, namun dari sisi konstruksi dapat dikelompokkan menjadi rumah berpondasi beton dan rumah berpondasi kayu. Rumah yang menggunakan pondasi beton, dinding papan atau bahan lebih kuat, serta atap seng yang relatif tahan lama cenderung dikategorikan sebagai bangunan permanen atau semi permanen, sedangkan rumah dengan pondasi kayu sederhana dan material yang mudah rusak lebih mendekati tipe non permanen/tradisional yang sangat bergantung pada bahan lokal dan kemampuan swadaya masyarakat.

Dari segi bahan bangunan, rumah-rumah di Kampung Mimika umumnya menggunakan dinding dari kayu atau papan, dengan sebagian kecil mulai beralih



ke material yang lebih kuat seperti batu bata untuk bagian tertentu. Atap kebanyakan memakai seng karena lebih mudah diperoleh dan tahan hujan, sementara itu rumah dengan atap yang menggunakan bahan lokal seperti rumbia tidak lagi ditemukan di

kampung Mimika. Lantai rumah panggung umumnya terbuat dari papan kayu, sementara pada rumah yang sudah diperkuat dengan pondasi dan struktur lebih permanen sebagian mulai memakai lantai semen di ruang tertentu. Variasi bahan ini mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, akses terhadap material bangunan, serta perpaduan antara teknik tradisional dan konstruksi yang lebih modern di Kampung Mimika.

Secara umum, kondisi bangunan rumah di Kampung Mimika bervariasi dari kategori layak huni hingga rusak ringan sejalan dengan pola perumahan pesisir Mimika yang masih banyak bergantung pada konstruksi kayu dan rumah panggung sederhana. Sebagian rumah dengan struktur lebih baru, pondasi kokoh (beton atau kayu kuat), dan atap yang masih baik dapat digolongkan sebagai layak huni, sedangkan rumah yang tiang kayunya mulai lapuk, dinding berlubang, atau atap bocor masuk dalam kategori rusak ringan. Gambaran ini sejalan dengan situasi perumahan di banyak kampung pesisir Mimika, di mana program rumah layak huni dari pemerintah kabupaten/provinsi masih terus didorong untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, termasuk bagi masyarakat Kamoro di wilayah pesisir.

Kepadatan hunian di Kampung Mimika mencerminkan pola permukiman pesisir yang cenderung memanjang mengikuti garis pantai dan tepi sungai, sehingga jumlah rumah per hektar lebih terkonsentrasi di zona dekat dermaga dan fasilitas umum kampung. Dalam satu petak lahan permukiman, beberapa rumah sering berdiri saling berdekatan karena keterbatasan lahan kering dan kebutuhan untuk tetap dekat dengan jalur transportasi air. Dari sisi jumlah kepala keluarga per rumah, situasinya mengikuti kecenderungan di mana rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 sampai 6 orang per KK, namun di kampung Mimika ini sering dijumpai satu rumah dihuni lebih dari satu KK karena ikatan keluarga besar yang kuat dan keterbatasan rumah layak huni. Hal ini membuat beberapa unit rumah di Kampung Mimika memiliki kepadatan hunian cukup tinggi, beberapa rumah ditempati lebih dari satu keluarga inti dalam satu bangunan rumah panggung.

2. Pola permukiman

Permukiman di Kampung Mimika tidak terpusat di satu titik, melainkan menyebar mengikuti garis pesisir dan alur sungai yang menjadi jalur utama aktivitas

warga. Rumah-rumah panggung warga tersebar dalam beberapa kelompok hunian yang saling berhubungan, tetapi tidak membentuk satu pusat kampung yang padat seperti di kawasan perkotaan; pola ini mencerminkan keterikatan masyarakat pada akses ke laut, sungai, dan kawasan rawa sebagai ruang hidup sehari-hari.

Permukiman di Kampung Mimika pada dasarnya mengikuti alur sungai dan kali kecil, dengan deretan rumah panggung yang dibangun memanjang di tepi perairan agar dekat dengan lokasi berlabuh perahu dan jalur transportasi utama. Arah sebaran rumah menyesuaikan kontur tepian sungai dan pesisir, sementara jalur jalan yang terbuat dari papan umumnya dibangun sejajar atau tegak lurus dengan alur sungai sebagai penghubung antar kelompok rumah dan menuju fasilitas umum kampung.

Kampung Mimika terbagi ke dalam tujuh Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di seluruh wilayah permukiman kampung. Dua RT berada di sekitar pelabuhan atau dermaga sebagai zona hunian yang paling dekat dengan aktivitas keluar-masuk barang dan orang, sementara lima RT lainnya berada di bagian tengah kampung yang menjadi area permukiman utama sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum seperti balai kampung, pasar, kios, dan gua Maria.

Jarak antar rumah di Kampung Mimika umumnya relatif rapat, terutama di zona dekat dermaga dan di RT-RT yang berada di pusat kampung, sehingga antar-rumah saling terhubung melalui jalan setapak atau papan yang juga menjadi akses menuju balai kampung, pasar, kios, dan gua Maria. Kerapatan ini memudahkan penarikan sambungan listrik dan berbagi air bersih/air hujan yang ditampung di bak penampungan ke sebagian besar rumah, meskipun kualitas akses jalan dan jaringan layanan dasar masih sangat dipengaruhi kondisi tanah rawa, pasang surut, dan keterbatasan infrastruktur di lingkungan pesisir.

3. Kepemilikan rumah

Status kepemilikan rumah di Kampung Mimika didominasi oleh rumah milik sendiri yang dibangun di atas tanah adat atau lahan keluarga, sejalan dengan kuatnya ikatan marga dan kepemilikan hak ulayat di kalangan masyarakat Kamoro/Mimika Wee. Sebagian besar keluarga menempati rumah yang mereka bangun secara swadaya, sering kali di atas lahan yang diwariskan turun-temurun

dari orang tua atau leluhur. Di samping itu, terdapat pula pola hunian menumpang di rumah keluarga atau kerabat dekat, misalnya anak yang sudah menikah namun belum memiliki rumah sendiri, atau kerabat yang datang dari kampung lain dan tinggal sementara di Kampung Mimika. Pola ini memperlihatkan kuatnya solidaritas keluarga besar dan budaya saling menampung, sementara skema rumah sewa atau kontrakan praktis tidak dikenal di Kampung Mimika karena rumah dan lahan umumnya terikat pada hubungan kekerabatan dan hak ulayat, bukan pada mekanisme pasar sewa formal.



Bekerjasama membangun rumah (dok.ippm)

Di Kampung Mimika, pembangunan rumah masyarakat pada umumnya dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola pemerintah kampung sebagai bagian dari program perbaikan dan penyediaan hunian layak bagi warga. Hampir seluruh unit rumah bantuan yang berdiri merupakan hasil pemanfaatan dana desa, dengan hanya satu rumah yang dibangun melalui sumber pendanaan di luar ADD, menunjukkan kuatnya peran dana desa dalam membentuk wajah permukiman kampung.

Proses pembangunan rumah dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan tenaga kerja dari warga kampung sendiri yang sebagian besar masih terikat hubungan kekerabatan, sehingga selain menekan biaya, kegiatan ini juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa memiliki terhadap rumah yang dibangun. Pola ini sejalan dengan praktik di beberapa kampung Kamoro lain, di mana dukungan program pemerintah (baik dana desa maupun program rumah layak huni) dipadukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal tanpa melepaskan nilai kebersamaan.



Rumah Adat Suku Kamoro (dok.ippm)

Di Kampung Mimika terdapat rumah adat atau rumah komunal yang menjadi simbol identitas budaya sekaligus ruang bersama bagi masyarakat, misalnya untuk pelaksanaan ritual adat, pertemuan suku/marga, maupun kegiatan sosial tertentu. Rumah adat ini umumnya dibangun dengan dominasi bahan kayu dan mengadopsi bentuk arsitektur tradisional pesisir Kamoro/Mimika Wee, sehingga tampil berbeda dari rumah panggung hunian sehari-hari dan berfungsi sebagai pusat kehidupan adat di kampung.

4. Luas bangunan dan jumlah kamar

Luas bangunan rumah di Kampung Mimika pada umumnya berkisar sekitar 7 x 6 meter, dengan rata-rata luas lahan tempat rumah berdiri kurang lebih 70 meter persegi per unit. Ukuran ini mencerminkan tipe rumah panggung sederhana yang dirancang cukup untuk menampung satu keluarga inti, dengan ruang yang terbatas namun masih memungkinkan pembagian area untuk ruang tamu, kamar tidur, dan dapur dalam satu bangunan.

Rata-rata rumah di Kampung Mimika memiliki dua kamar tidur berukuran sekitar 3 x 4 meter, yang digunakan oleh anggota keluarga inti untuk tidur dan menyimpan barang-barang pribadi. Ruang tamu umumnya berukuran kurang lebih 18 meter persegi dan berfungsi sebagai area utama berkumpul, menerima tamu, sekaligus ruang serbaguna untuk aktivitas keluarga sehari-hari. Dapur berada di bagian belakang atau sisi rumah, sedangkan kamar mandi biasanya terletak terpisah dari



bangunan utama di bagian belakang rumah dan hanya difungsikan untuk mandi. Untuk mencuci piring dan peralatan rumah tangga, warga membuat tempat khusus di luar rumah, di samping atau depan rumah dengan konsep terbuka yang memanfaatkan aliran air atau tampungan sederhana. Fasilitas WC/jamban umumnya belum tersedia di dalam rumah; sebagian warga menggunakan jamban umum yang berada di sekitar permukiman dengan kondisi seadanya, tanpa keran maupun bak penampung air sehingga setiap pengguna harus membawa air sendiri.

Beberapa rumah pernah memiliki jamban pribadi di dalam rumah, namun banyak yang rusak dan tidak lagi difungsikan akibat seringnya banjir rob yang merendam bagian bawah rumah dan merusak instalasi sanitasi.

5. Ketersediaan fasilitas dasar rumah tangga

Akses air bersih bagi rumah tangga di Kampung Mimika masih sangat bergantung pada sumber-sumber alami seperti air hujan dan air sungai yang diambil dan diolah secara sederhana oleh warga. Sebagian besar keluarga menampung air hujan menggunakan drum, ember, atau bak penampung untuk kebutuhan minum dan masak, sementara untuk mandi dan mencuci banyak yang masih memanfaatkan air sungai di sekitar kampung.



Bak penampungan air penduduk (dok.ippm)

Layanan air perpipaan sudah mulai dikembangkan dan akan disalurkan ke beberapa titik wilayah kampung Mimika, termasuk rencana dan program penyediaan air bersih di Kokonao dan kampung-kampung sekitar, namun cakupannya belum sepenuhnya menjangkau seluruh rumah di Kampung Mimika. Kondisi ini membuat kombinasi penampungan air hujan, pengambilan air dari sungai, dan pemanfaatan fasilitas air bersih bersama (jika nanti tersedia) masih menjadi pola utama pemenuhan kebutuhan air rumah tangga di kampung. Dalam waktu dekat program pipanisasi/penyaluran air bersih melalui pipa ke rumah-rumah warga ini akan segera diresmikan dan masyarakat kampung Mimika akan menikmati air bersih dengan mudah.

Sistem sanitasi di Kampung Mimika masih didominasi oleh penggunaan jamban cemplung sederhana, baik dalam bentuk jamban keluarga maupun jamban umum yang dibangun di sekitar permukiman. Sebagian besar rumah belum memiliki septic tank yang layak, sehingga jamban yang ada tergolong jamban tidak sehat karena limbah langsung masuk ke tanah atau dialirkan ke lingkungan sekitar tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Sistem penerangan di Kampung Mimika saat ini pada dasarnya sudah terhubung dengan jaringan listrik PLN, namun pasokan listrik belum berlangsung



penyalaan 24 jam. Listrik biasanya menyala mulai sekitar pukul 18.00 hingga pagi hari, dan dalam kondisi tertentu seperti banjir rob yang datang pada dini hari, petugas terpaksa mematikan aliran listrik untuk melindungi mesin dan instalasi dari kerusakan. Sebagian kecil

warga memiliki genset yang digunakan terutama untuk mendukung pekerjaan teknis seperti pemotongan dan perapian kayu saat pembangunan rumah, bukan untuk penerangan rutin sehari-hari. Untuk penerangan lingkungan, beberapa ruas jalan di Kampung Mimika telah dilengkapi lampu tenaga surya (*solar cell*) yang dipasang melalui dukungan pemerintah distrik, sehingga membantu menerangi jalur utama kampung ketika malam hari meskipun listrik rumah tangga sedang padam.

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kampung Mimika saat ini masih sangat terbatas dan belum terorganisasi dengan baik. Tidak tersedia Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun sistem pengangkutan sampah teratur, sehingga sebagian besar sampah rumah tangga tidak dikelola secara kolektif. Hanya sedikit warga yang membakar sampah sendiri di sekitar rumah, sementara sebagian besar lainnya memilih membuang sampah begitu saja di pekarangan, tepian sungai, atau area kosong dengan anggapan bahwa banjir rob akan membawa sampah tersebut hanyut ke arah hutan bakau atau laut. Kebiasaan ini menimbulkan masalah serius karena mencemari lingkungan pesisir dan ekosistem mangrove, merusak kualitas perairan yang menjadi sumber ikan dan biota lain, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat Kampung Mimika sendiri.

Sistem drainase di sekitar rumah-rumah di Kampung Mimika umumnya masih sangat sederhana dan pada banyak titik bahkan belum terbentuk saluran yang jelas. Kondisi tanah yang berupa dataran rendah rawa dan dekat dengan pasang surut membuat air hujan maupun limpasan pasang laut sering menggenang di

bawah dan sekitar rumah panggung, terutama di musim hujan atau saat banjir rob. Ketiadaan saluran drainase yang teratur dan tertata menyebabkan genangan air dapat bertahan cukup lama di kolong rumah dan jalur-jalur jalan kampung, sehingga memicu becek, mempercepat pelapukan tiang kayu, serta berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Situasi ini menjadikan sebagian besar kawasan permukiman Kampung Mimika tergolong rawan genangan, sehingga upaya perbaikan drainase menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kesehatan lingkungan dan ketahanan rumah warga.

6. Kondisi lingkungan permukiman

Kondisi kebersihan lingkungan permukiman di Kampung Mimika masih menghadapi banyak tantangan, terutama karena kebiasaan membuang sampah rumah tangga secara sembarangan di sekitar rumah, pekarangan, dan tepi sungai. Ketiadaan sistem pengelolaan sampah yang teratur membuat sebagian warga



Genangan air di rumah penduduk (dok.ippm)

terbiasa membiarkan sampah menumpuk dengan harapan akan terbawa banjir rob atau arus sungai, padahal hal ini justru memperparah pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan. Genangan air, sampah plastik, dan limbah rumah tangga yang berserakan di sekitar rumah dan kolong rumah panggung berpotensi menjadi sumber penyakit, termasuk diare dan penyakit kulit, serta memperburuk kualitas lingkungan hidup masyarakat pesisir. Sejumlah program kesehatan lingkungan dari pemerintah daerah dan lembaga mitra mulai mendorong perubahan perilaku dan edukasi kebersihan seperti program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), namun perubahan pola hidup sehari-hari masih sangat dibutuhkan agar lingkungan permukiman Kampung Mimika menjadi lebih sehat dan nyaman dihuni.

Akses jalan di Kampung Mimika menunjukkan kombinasi antara jalan yang sudah diperkeras dan jalur yang masih berupa tanah lumpur. Di sekitar pusat pemerintahan kampung, jalan utama telah menggunakan batu/paving blok sehingga memudahkan pergerakan warga menuju balai kampung, sekolah, gereja, dan

fasilitas umum lainnya, sedangkan di beberapa ruas yang mengarah ke pelabuhan atau dermaga telah dibangun jalan beton dengan ketinggian tertentu untuk mengantisipasi genangan air saat pasang atau hujan. Meski demikian, masih terdapat satu RT yang akses utamanya berupa jalan tanah berlumpur sehingga pada musim hujan menjadi licin dan sulit dilalui. Dari jalan utama ke rumah-rumah warga, banyak jalur yang masih menggunakan titian papan yang disangga kayu di bawahnya untuk melintasi tanah rawa dan genangan air, sehingga akses sehari-hari warga sangat bergantung pada kondisi kayu dan papan tersebut yang mudah rusak jika sering tergenang atau lapuk.

Lingkungan permukiman di Kampung Mimika memiliki risiko bencana yang cukup menonjol terutama terkait banjir dan abrasi pantai. Letak kampung di dataran rendah pesisir membuat rumah-rumah panggung warga kerap terdampak banjir rob dan genangan saat pasang tinggi atau hujan lebat, yang dapat merusak struktur kayu, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Ancaman abrasi juga muncul di beberapa bagian tepi pantai dan sungai akibat gelombang, arus, dan berkurangnya vegetasi pelindung seperti mangrove, sehingga garis daratan perlahan tergerus dan mendekati permukiman. Meski risiko longsor relatif kecil karena wilayah kampung berupa dataran, angin kencang dan kondisi tanah jenuh air dapat memicu tumbang pohon-pohon besar di sekitar rumah, yang berpotensi menimbulkan kerusakan bangunan dan membahayakan keselamatan warga.

Keberadaan halaman dan pekarangan di Kampung Mimika umumnya terbatas karena rumah-rumah dibangun di atas lahan sempit di kawasan pesisir dan rawa. Ruang di depan atau samping rumah lebih banyak difungsikan sebagai tempat aktivitas harian, menjemur ikan atau pakaian, serta area lalu lintas warga, dibanding sebagai taman atau kebun yang tertata rapi. Pagar permanen jarang dijumpai, batas lahan biasanya dikenali secara adat melalui kesepakatan keluarga dan pengetahuan lokal mengenai titik-titik penanda, bukan dengan garis pagar tembok atau besi. Di banyak tempat, tiang kayu, pohon tertentu, atau posisi rumah itu sendiri menjadi penanda tidak formal batas lahan antar keluarga, sejalan dengan pola kepemilikan yang bertumpu pada hak ulayat dan hubungan kekerabatan.

7. Masalah utama dan kebutuhan perumahan

Kondisi perumahan di Kampung Mimika saat ini didominasi oleh rumah-rumah yang sudah tergolong layak huni, meskipun masih terdapat sebagian yang masuk kategori tidak layak huni (RTLH). Dari total 129 unit rumah penduduk, sekitar 25 rumah masih diklasifikasikan sebagai rumah tidak layak huni karena kondisi fisik bangunan yang memerlukan perbaikan, sementara rumah lainnya relatif memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan dasar untuk dihuni. Dua puluh lima rumah RTLH tersebut saat ini telah terdata dan masuk dalam rencana renovasi melalui dukungan dana desa, sehingga statusnya sedang dalam proses penanganan sambil menunggu kucuran anggaran berikutnya. Rencana perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah RTLH secara signifikan, sehingga ke depan hampir seluruh rumah di Kampung Mimika dapat mencapai kondisi layak huni yang lebih baik bagi penghuninya.

Kelebihan penghuni per rumah masih menjadi salah satu isu yang muncul di sebagian rumah di Kampung Mimika, terutama pada keluarga besar yang tinggal



bersama dalam satu unit rumah panggung. Dalam beberapa kasus, satu rumah dihuni lebih dari satu kepala keluarga karena anak yang sudah menikah tetap menumpang di rumah orang tua atau kerabat, sehingga jumlah penghuni per rumah menjadi cukup

banyak dan ruang tidur harus dibagi bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *overcrowding*, terutama di rumah dengan dua kamar tidur berukuran terbatas, karena satu kamar dapat ditempati beberapa anggota keluarga lintas generasi. Selain mengurangi kenyamanan, kepadatan penghuni juga dapat berdampak pada kesehatan, privasi, dan kualitas hidup, sehingga kebutuhan penambahan atau pemecahan unit rumah baru menjadi penting dalam perencanaan perumahan ke depan di Kampung Mimika.

Minimnya akses air bersih dan sanitasi masih menjadi salah satu persoalan utama dalam lingkungan perumahan di Kampung Mimika. Sebagian besar rumah

tangga belum terlayani jaringan air perpipaan sehingga warga banyak bergantung pada air hujan dan air sungai yang kualitasnya sangat dipengaruhi musim serta kondisi lingkungan sekitar. Di sisi sanitasi, keterbatasan jamban keluarga yang sehat dan ketiadaan *septic tank* layak membuat sebagian warga masih menggunakan jamban cemplung sederhana, jamban umum dengan fasilitas terbatas, atau bahkan buang air di sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan air bersih dan sanitasi dasar di Kampung Mimika belum memadai, dan masih memerlukan peningkatan sarana fisik sekaligus perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Lokasi permukiman Kampung Mimika yang berada di dataran rendah pesisir dan dekat dengan muara sungai membuat sebagian kawasan rumah warga berada pada zona yang berisiko tinggi terhadap banjir dan abrasi. Rumah-rumah yang berdiri di tepi sungai, dekat garis pantai, atau di area yang sering tergenang saat pasang besar dan hujan lebat sangat rentan mengalami kerusakan pada tiang, lantai, dan akses jalan. Di beberapa titik, garis tepi sungai dan pantai perlahan mundur akibat abrasi, terutama di area yang vegetasi pelindungnya seperti mangrove mulai berkurang atau tertekan oleh aktivitas manusia. Permukiman yang terlalu dekat dengan tepi air tanpa perlindungan vegetasi dan tanggul memadai berisiko terdampak langsung oleh gelombang, arus, dan banjir rob, sehingga penataan ulang zona hunian dan penguatan sabuk hijau mangrove menjadi kebutuhan penting bagi keselamatan rumah-rumah di Kampung Mimika.

Dukungan bantuan perumahan dari pemerintah kabupaten maupun program lain di luar Dana Desa masih dirasakan sangat terbatas oleh warga Kampung Mimika, meskipun kebutuhan rumah layak huni di wilayah Mimika secara umum masih tinggi. Program bantuan rumah sehat dan rumah layak huni dari pemerintah daerah memang ada, namun alokasinya terbagi ke banyak distrik dan kampung sehingga tidak semua rumah tangga di Kampung Mimika dapat terjangkau. Dalam praktiknya, hampir seluruh rumah di Kampung Mimika dibangun melalui pemanfaatan Dana Desa dan swadaya masyarakat, sehingga kualitas dan jumlah unit sangat bergantung pada besaran pagu anggaran desa serta prioritas musyawarah kampung setiap tahun. Kondisi ini membuat beban penyediaan

perumahan lebih banyak ditanggung pemerintah kampung, sementara dukungan tambahan dari APBD, dana otsus, maupun program perumahan pusat masih perlu diperjuangkan agar *backlog* rumah layak huni dapat berkurang secara lebih signifikan di Kampung Mimika.

C. Kependudukan

1. Suku-suku di Kampung

a. Suku/marga asli

Penduduk asli Kampung Mimika berasal dari rumpun suku Kamoro atau Mimika Wee yang sejak lama mendiami wilayah pesisir dan muara sungai di Kabupaten Mimika. Suku Kamoro memiliki ikatan kuat dengan lingkungan sungai, sagu, dan pesisir, sehingga wilayah adat mereka di sekitar Kampung Mimika dipandang sebagai bagian dari tanah ulayat Kamoro yang diwariskan turun-temurun. Dalam struktur sosial adat, masyarakat Kamoro tersusun dalam unit taparu (kelompok besar kekerabatan) yang kemudian terbagi lagi ke dalam berbagai marga atau fam sebagai penanda garis keturunan.

Masyarakat Kampung Mimika tersusun dalam dua kelompok marga besar (taparu), yaitu Taparu Maniaripiti dan Taparu Wakumuaripiti, yang menjadi payung utama kekerabatan adat di kampung. Kedua taparu ini kemudian menaungi total 11 marga di bawahnya yang membentuk komunitas adat Kampung Mimika secara keseluruhan. Taparu Maniaripiti terdiri beberapa marga seperti Iwakaripiti, Tepakiaripimara, Auriaripiti, Bakarparipiti, Ekayaripiti dan Taoroparipiti. Sedangkan taparu Wakumuaripiti terdiri dari marga Baporearipimra, Burupiarimara, Barapetearimara, Wayamearipiti, dan Utirikiyapimara.

Bagi warga Kampung Mimika, penyebutan nama suku Kamoro/Mimika Wee dan marga-marga utamanya bukan hanya menunjukkan asal-usul penduduk asli, tetapi juga berkaitan dengan hak atas tanah, hutan, dan perairan di sekitar kampung. Keterikatan marga pada taparu tertentu menjadi dasar pengaturan ruang hidup, lokasi permukiman, serta pembagian peran adat dalam upacara dan musyawarah kampung, sehingga identitas suku dan marga tetap sangat penting dalam kehidupan sehari-hari penduduk asli kampung ini.

Sistem kekerabatan masyarakat adat di Kampung Mimika pada dasarnya mengikuti garis keturunan patrilineal, di mana identitas suku, marga, dan hak-hak adat utama biasanya diturunkan melalui garis ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki peran penting dalam meneruskan nama marga dan ikatan dengan taparu ayah, sementara pengaturan tempat tinggal setelah menikah umumnya cenderung patrilokal, yaitu pasangan menempati lingkungan keluarga pihak laki-laki. Namun, dalam praktik sosial-budaya Kamoro/Mimika Wee juga dikenal adanya unsur pewarisan tertentu yang terkait garis ibu, misalnya dalam pengelolaan beberapa sumber daya alam dan penguatan hubungan kekerabatan lintas taparu. Pola ini mencerminkan bahwa meskipun garis keturunan utama bersifat patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak ibu tetap dijaga dan memiliki peran dalam jaringan sosial dan dukungan antar-kerabat di Kampung Mimika.

Sebaran marga di Kampung Mimika pada dasarnya mengikuti pengelompokan taparu, sehingga zona pemukiman cenderung membentuk kantong-kantong hunian berdasarkan kedekatan kekerabatan. Dalam satu deret rumah atau blok permukiman biasanya didominasi oleh keluarga dari marga yang sama atau masih satu taparu, sehingga tetangga terdekat umumnya masih memiliki hubungan saudara dekat maupun sepupu. Pola sebaran ini membuat ruang kampung terbagi secara tidak tertulis ke dalam wilayah hunian menurut marga, yang berhubungan dengan sejarah penguasaan lahan dan pembukaan tanah ulayat oleh leluhur masing-masing taparu. Di beberapa kampung Kamoro lain, zona permukiman marga juga berkaitan dengan kedekatan terhadap sungai, hutan sagu, atau jalur utama transportasi, sehingga penataan rumah di Kampung Mimika dapat dibaca sebagai cerminan struktur sosial dan kekerabatan masyarakat adatnya.

b. Suku pendatang

Masyarakat Kampung Mimika tidak hanya dihuni oleh penduduk asli Kamoro/Mimika Wee, tetapi juga oleh berbagai kelompok pendatang dari dalam dan luar Papua yang telah lama menetap dan menjadi bagian penting dari kehidupan kampung. Kelompok pendatang yang banyak dijumpai antara lain berasal dari Kei dan Tanimbar (Maluku), Biak, Serui, Fak-Fak, dan Kaimana (Papua pesisir), serta suku-suku dari Sulawesi dan Jawa seperti Toraja, Bugis, dan Jawa yang datang

sebagai pedagang, pekerja, maupun mengikuti program transmigrasi dan perpindahan spontan sejak masa pengembangan wilayah Mimika.

Sebagian besar keluarga pendatang ini telah tinggal di Mimika sejak satu hingga lebih dari beberapa dekade, sehingga banyak di antara mereka sudah beranak cucu dan menjadikan kampung sebagai domisili tetap, bukan sekadar tempat singgah kerja. Integrasi mereka ke dalam komunitas kampung berlangsung melalui beberapa cara, seperti bertetangga dengan keluarga Kamoro, ikut dalam kegiatan gereja dan keagamaan, terlibat dalam organisasi kampung, hingga membangun hubungan perkawinan campuran dengan warga lokal, sehingga pola hidup, bahasa sehari-hari, dan jejaring sosial mereka semakin menyatu dengan kehidupan masyarakat Kampung Mimika.

c. Peran sosial masing-masing kelompok etnis

Dalam kehidupan sosial di Kampung Mimika, kelompok etnis Kamoro/Mimika Wee sebagai penduduk asli memegang peran utama dalam kelembagaan adat dan pemerintahan kampung, khususnya terkait pengaturan tanah ulayat, musyawarah adat, dan penentuan pemimpin adat melalui struktur seperti kepala suku, dewan adat, dan ketua taparu. Dalam forum-forum resmi kampung dan lembaga adat, suara tokoh Kamoro menjadi rujukan penting dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk ketika berhubungan dengan pemerintah, gereja, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap wilayah kampung.

Kelompok pendatang dari Kei, Tanimbar, Biak, Serui, Fak-Fak, Kaimana, Toraja, Bugis, dan Jawa lebih banyak berperan dalam kegiatan ekonomi, jasa, dan jaringan perdagangan, misalnya melalui usaha kios, perikanan, transportasi, pekerjaan di sektor formal maupun informal yang berkembang seiring aktivitas kota Timika dan perusahaan tambang. Dalam bidang keagamaan, baik penduduk asli maupun pendatang membaur dalam jemaat gereja atau komunitas keagamaan lain, di mana orang Kamoro, Toraja, Bugis, dan Jawa sama-sama dapat menjadi pengurus, koordinator kegiatan, atau panitia perayaan hari besar, sehingga ruang ibadah menjadi salah satu arena integrasi antar-etnis yang cukup kuat.

Dalam pemerintahan kampung formal, jabatan kepala kampung dan perangkat umumnya diisi oleh warga asli pemilik ulayat, sementara warga

pendatang lebih sering berkontribusi melalui lembaga kemasyarakatan seperti RT, organisasi keagamaan, kelompok pemuda, dan kelompok perempuan. Pola ini mencerminkan pembagian peran yang saling melengkapi: penduduk asli menguatkan legitimasi adat dan politik lokal, sedangkan komunitas pendatang memperkuat dinamika ekonomi, jaringan sosial, dan kapasitas organisasi, sehingga keduanya bersama-sama saling menopang ketahanan sosial kampung meskipun tetap saja masih ada potensi gesekan yang perlu dikelola melalui dialog dan musyawarah.

d. Relasi sosial

Relasi sosial di Kampung Mimika pada umumnya ditandai suasana hidup berdampingan yang cukup harmonis antara masyarakat asli dan berbagai kelompok suku pendatang. Nilai lokal seperti saling menghormati, mengutamakan musyawarah, dan menjunjung tinggi tokoh adat serta pemuka agama menjadi landasan penting untuk meredam ketegangan dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Tradisi gotong royong masih tampak kuat dalam berbagai kegiatan bersama, seperti kerja bakti memperbaiki jalan kampung, membersihkan goa Maria dan fasilitas umum, serta membantu keluarga yang sedang mengadakan pesta adat, pernikahan, atau duka. Dalam momen-momen tersebut, warga asli maupun pendatang dari Kei, Bugis, Toraja, Jawa, dan suku lain dapat terlibat bersama, sehingga tercipta jaringan solidaritas lintas etnis yang memperkuat rasa memiliki terhadap kampung.

Pola interaksi sosial sehari-hari umumnya terbangun melalui ruang-ruang pertemuan informal seperti halaman rumah, pelabuhan, pasar kecil, dan lingkungan gereja atau komunitas keagamaan, di mana warga dari berbagai suku saling bertegur sapa, berdagang, atau bekerja sama dalam kelompok. Meski dinamika pembangunan dan kesenjangan ekonomi sesekali memunculkan gesekan antar kelompok, mekanisme dialog adat, peran tokoh agama, dan berbagai forum kampung menjadi sarana penting untuk memulihkan hubungan sehingga cita-cita hidup harmonis dalam keberagaman tetap dapat dipertahankan di Kampung Mimika.

2. Nilai dan Kearifan Lokal

a. Norma adat dan sistem sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat di Kampung Mimika memegang kuat norma adat yang mengatur hubungan antar warga, cara berperilaku, serta tata kelola sumber daya seperti tanah, sungai, dan hutan sagu. Aturan adat menjadi rujukan utama dalam penyelesaian masalah, misalnya konflik antar keluarga, pelanggaran batas lahan, atau perselisihan kecil, yang biasanya diselesaikan melalui musyawarah adat dengan melibatkan para tetua dan kepala marga, sehingga sanksi lebih banyak bersifat pemulihan hubungan dan penghormatan kembali pada kesepakatan bersama. Tanah ulayat di kawasan Mimika dipandang sebagai warisan leluhur yang sakral, sehingga pembagian dan pemanfaatannya diatur berdasarkan garis marga dan taparu, setiap kelompok marga memiliki zona ulayat tertentu, dan penggunaan lahan oleh pihak lain (termasuk pemerintah) idealnya melalui persetujuan adat dan kesepakatan kompensasi yang disepakati secara kolektif.

Struktur kelembagaan adat di kalangan masyarakat Kampung Mimika tersusun berlapis, mulai dari kepala suku atau tokoh wilayah adat, kepala taparu dan kepala marga, hingga tua-tua adat yang berperan sebagai penjaga ingatan sejarah, penafsir norma, dan penasihat dalam musyawarah. Di tingkat kabupaten dan wilayah pesisir, lembaga adat seperti Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) Kamoro menjadi payung yang mengkoordinasikan para kepala suku dan dewan adat dari berbagai kampung, berfungsi memperjuangkan hak ulayat, melindungi identitas budaya, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam urusan pembangunan dan penyelesaian sengketa menyangkut tanah dan kepentingan masyarakat adat.

b. Ritual, tradisi dan upacara

Ritual-ritual adat dan keagamaan di Kampung Mimika masih dijalankan berdampingan, terutama pada peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, panen, dan kematian. Upacara pernikahan adat masyarakat kampung Mimika tetap memegang peran penting melalui tahapan peminangan, pemberian mas kawin simbolik, hingga pengesahan adat yang sering dipadukan dengan pemberkatan gereja, sementara pada peristiwa kematian keluarga besar berkumpul untuk doa,

ritual penghormatan leluhur, dan penguburan yang diiringi aturan adat tertentu seperti tipa duduk. Dalam konteks penghidupan tradisional, rasa syukur atas hasil laut dan sagu juga diekspresikan melalui doa bersama dan makan adat, sehingga siklus hidup dan musim masih diikat oleh praktik-praktik ritual yang menegaskan hubungan manusia, alam, dan leluhur di Kampung Mimika.

Musik, tarian, dan simbol-simbol budaya khas Kamoro sangat menonjol dalam berbagai perayaan di kampung, menjadi penanda identitas kolektif masyarakat. Tarian Seka dan tarian lain seperti Aniri biasanya dibawakan secara berkelompok dengan iringan tifa dan nyanyian berbalas, menghadirkan suasana sukacita dan kebersamaan pada pesta adat maupun acara keagamaan. Sementara itu, seni ukir patung mbitoro, motif-motif alam pada ukiran kayu, serta hiasan tubuh tradisional menjadi simbol penting yang tidak hanya tampil dalam upacara adat dan inisiasi, tetapi juga mulai dipamerkan dalam festival budaya dan kegiatan kampung sebagai cara merawat sekaligus memperkenalkan kekhasan budaya Kampung Mimika kepada generasi muda dan pihak luar.

c. Pengetahuan lokal

Pengetahuan lokal masyarakat Kampung Mimika sangat kuat terkait pengelolaan hutan, sungai, sagu, perikanan, dan kebun, yang berpijak pada prinsip hidup selaras dengan alam. Masyarakat Kamoro/Mimika Wee mengenal prinsip tiga S (sungai, sagu, sampan), yang tercermin dalam cara mereka mengatur dusun sagu, jalur tangkap ikan, dan kawasan pesisir. Ada zona yang boleh diambil hasilnya secara bergiliran, ada lokasi yang diistirahatkan, serta ada tempat-tempat yang diperlakukan sakral dan tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Dalam kegiatan perikanan dan kebun, penggunaan alat tangkap sederhana, pemilihan musim panen, serta pantangan adat tertentu berfungsi sebagai bentuk manajemen sumber daya dan sekaligus strategi mengurangi risiko bencana lokal seperti banjir, abrasi, maupun kelangkaan hasil laut dan sagu, karena masyarakat membaca tanda-tanda alam dan menghormati batas-batas ekologi yang diwariskan leluhur.

Pengetahuan masyarakat Kampung Mimika tentang obat-obatan tradisional masih sangat hidup dan dipraktikkan berdampingan dengan layanan kesehatan modern. Warga mengenal berbagai jenis daun dan bagian tumbuhan untuk

mengobati penyakit, misalnya daun afrika yang dimanfaatkan untuk keluhan tulang dengan cara direbus dan diminum selama beberapa hari berturut-turut, daun “Eyawas” untuk meredakan sakit perut, daun sambiroto hutan yang dipercaya mampu menangkal dampak lanjutan dari bisa ular, serta kulit lawang yang umum digunakan untuk mengatasi masuk angin dan pegal linu. Pengetahuan ini biasanya diwariskan secara lisan dari orang tua dan tetua kampung, sering kali dipadukan dengan doa atau praktik adat sederhana, dan menjadi bagian dari sistem etnomedisin lokal yang juga tercatat pada berbagai studi tentang pemanfaatan tumbuhan obat di kalangan Kamoro dan masyarakat Mimika.

Selain pengobatan, masyarakat juga memiliki keterampilan navigasi sungai yang baik dengan membaca arus, pasang surut, dan tanda-tanda alam untuk menentukan waktu aman berlayar serta lokasi tangkapan ikan, yang sangat penting di lingkungan pesisir dan muara berlumpur. Di bidang kerajinan, kemampuan mengukir kayu, membuat patung dan tiang mbitoro, perisai, dayung, serta anyaman dan pernik-pernik etnik menjadi wujud pengetahuan teknis dan estetika yang terus dikembangkan, sekaligus menjadi sumber identitas budaya dan tambahan ekonomi rumah tangga ketika kerajinan tersebut dijual atau dipamerkan dalam kegiatan budaya kampung.

d. Nilai-nilai dasar masyarakat

Nilai solidaritas dan gotong royong masih menjadi fondasi kuat kehidupan sosial masyarakat di Kampung Mimika, terutama dalam konteks hubungan antar marga dan antar kelompok etnis. Warga terbiasa bekerja bersama saat membangun atau memperbaiki rumah, membuka kebun, mengadakan pesta adat, maupun membantu keluarga yang mengalami keduakaan, sehingga beban biaya dan tenaga menjadi tanggungan kolektif dan memperkuat rasa sepenanggungan lintas kekerabatan. Praktik kerja sama antar marga ini juga terlihat ketika kampung menghadapi persoalan bersama, misalnya terkait akses layanan dasar atau klaim tanah ulayat, di mana berbagai marga dan taparu dapat bersatu dalam satu suara melalui forum adat dan musyawarah kampung.

Nilai kekeluargaan tercermin dari hubungan yang erat antara keluarga inti, keluarga besar, dan kerabat lintas marga, serta sikap saling mengasuh anak-anak

dalam lingkungan kampung yang dipandang sebagai “rumah bersama”. Penghormatan kepada tokoh adat dan tokoh agama menempati posisi penting, keputusan kepala suku, kepala marga, tua adat, dan pastor atau pemuka agama menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah, merencanakan pembangunan kampung, hingga menjaga kedamaian antar kelompok. Dalam berbagai acara resmi dan seremoni kampung, penyebutan dan pelibatan tokoh-tokoh ini selalu didahulukan sebagai bentuk pengakuan atas jasa, wibawa moral, dan peran mereka sebagai penjaga nilai-nilai luhur masyarakat Mimika.

e. Bahasa lokal

Dalam kehidupan sehari-hari di Kampung Mimika, bahasa yang digunakan masyarakat merupakan campuran antara bahasa Kamoro sebagai bahasa asli kampung Mimika dan bahasa Indonesia (termasuk ragam Melayu Papua) sebagai bahasa pergaulan antar suku. Di lingkungan keluarga dan antarsesama orang Kamoro yang lebih tua, bahasa Kamoro masih kerap dipakai dalam percakapan informal, terutama untuk membicarakan adat, cerita leluhur, dan aktivitas tradisional seperti sagu dan melaut, sedangkan di sekolah, gereja, dan pertemuan resmi kebanyakan warga beralih ke bahasa Indonesia agar dapat dipahami seluruh kelompok etnis. Namun, tingkat pelestarian bahasa Kamoro menghadapi tantangan karena generasi muda semakin banyak menggunakan bahasa Indonesia dan jarang fasih berkomunikasi penuh dalam bahasa daerah, sehingga dikhawatirkan terjadi pergeseran bahasa jika tidak ada upaya khusus.

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Mimika menunjukkan komposisi demografis yang relatif kecil namun dinamis. Berdasarkan data Agregat Semester-1 Dukcapil Tahun 2025, total penduduk yang mendiami Kampung Mimika mencapai 260 jiwa yang tersebar dalam 135 Kepala Keluarga. Struktur ini mencerminkan karakter permukiman kampung pesisir yang berkembang secara bertahap melalui mobilitas internal masyarakat Kamoro maupun kedatangan penduduk dari wilayah sekitar kampung Mimika.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki mencapai 141 jiwa (54,23%), sedangkan jumlah perempuan sebanyak 119 jiwa (45,77%). Perbandingan ini memperlihatkan dominasi populasi laki-laki yang cukup signifikan di kampung Mimika, yang pada konteks kehidupan masyarakat pesisir berkaitan erat dengan peran dan fungsi laki-laki dalam aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan, pemanfaatan sumber daya alam, serta pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Secara etnis, masyarakat Kampung Mimika didominasi oleh Suku Kamoro sebagai penduduk asli yang telah menempati kawasan ini secara turun-temurun. Identitas suku Kamoro tercermin dalam pola permukiman, praktik adat, penggunaan bahasa sehari-hari, pola hidup serta orientasi aktivitas mata pencaharian yang kuat dan sangat terkait dengan sumber daya pesisir dan sungai. Keberadaan mereka menjadi fondasi sosial-budaya utama dalam kehidupan kampung.

Selain penduduk asli, terdapat pula kelompok pendatang dalam jumlah kecil yang telah menetap sejak tahun 1960-an (suku Bugis Makasar) dan 1980-an Suku Kei, Tanimbar, dan Toraja. Kelompok ini umumnya bekerja sebagai tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, dan pedagang yang berperan dalam memperkuat aktivitas ekonomi, memperkaya interaksi sosial, serta mendukung ketersediaan layanan dasar di kampung. Kehadiran pendatang ini semakin memperluas jejaring sosial sekaligus memperkuat struktur kehidupan masyarakat Kampung Mimika secara keseluruhan.

b. Struktur umur penduduk

Struktur umur penduduk memberikan gambaran tentang potensi demografi yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan pembangunan yang responsif usia, terutama dalam penyediaan berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi termasuk berbagai program pembangunan yang berbasis pada struktur dan profil kependudukan.

Distribusi penduduk Kampung Mimika menurut umur pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Kampung Mimika menurut Umur
Tahun 2025

No.	Interval Umur (Tahun)	Jumlah	Presentase
1.	0 - 4	32	6,10
2.	5 - 9	63	12,00
3.	10 - 14	47	8,95
4.	15 - 19	69	13,14
5.	20 - 24	47	8,95
6.	25 - 29	37	7,05
7.	30 - 34	37	7,05
8.	35 - 39	41	7,81
9.	40 - 44	37	7,05
10.	45 - 49	25	4,76
11.	50 - 54	22	4,19
12.	55 - 59	19	3,62
13.	60 - 64	13	2,48
14.	65 - 69	15	2,86
15.	70 - 74	9	1,71
16.	75+	12	2,29
	Total	525	100

Sumber: Data Agregat SMT-1 Dukcapil, 2025

Distribusi penduduk kampung Mimika berdasarkan Rasio beban tanggungan (*Dependency Ratio*) yaitu sebesar:

$$\frac{142 + 36}{347} \times 100 = 51,30 \text{ dibulatkan menjadi } 51$$

Sesuai angka tersebut di atas, berarti DR kampung Mimika sebesar 51, dimana setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 51 orang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan $\geq 64+$ tahun). Nilai ini menunjukkan beban tanggungan yang harus dipenuhi kelompok usia kerja. Tingginya angka DR ini merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi di kampung Mimika, karena sebagian pendapatan yang diperoleh kelompok yang produktif terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum atau tidak produktif.

Namun fakta menarik lain bahwa berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Dinas Dukcapil Mimika Tahun 2025 jumlah penduduk kampung Mimika yang sudah terekam administrasi kependudukan e-KTP 83,99%, KTA 73,65%, KK 100% dan Akta Kelahiran 98,8%. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar

penduduk kampung Mimika telah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga berpeluang mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan pemerintah.

c. Tingkat pendidikan

Pendidikan memegang peranan kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dalam jangka panjang berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian. Ketika tingkat pendidikan masyarakat semakin baik, kemampuan, kecakapan, dan produktivitas mereka akan meningkat sehingga mendorong lahirnya keterampilan kewirausahaan dan terciptanya berbagai peluang kerja baru. Pada akhirnya, kondisi ini ikut mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi dan memutus rantai kemiskinan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan formal tertinggi yang berhasil diselesaikan seseorang, serta mencerminkan kemampuan literasi, kapasitas kerja dan potensi partisipasi dalam pembangunan sosial maupun ekonomi.

Di Kampung Mimika sendiri saat ini belum terdapat sarana pendidikan yang khusus dibangun di dalam wilayah kampung. Seluruh akses terhadap layanan pendidikan formal, mulai dari TK/PAUD, SD, SMP hingga SMA, terpusat di Ibu kota distrik sebagai lokasi sekolah-sekolah di Distrik Mimika Barat. Bahkan ada juga peserta didik yang harus keluar dari kampung seperti ke Timika bahkan ke kota besar lainnya seperti Makassar, Manado dan ke Jawa untuk dapat mengenyam pendidikan.

Kondisi tersebut membuat proses melanjutkan sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi banyak keluarga karena keterbatasan akses, biaya dan dukungan logistik bagi anak-anak yang harus tinggal jauh dari rumah. Situasi ini berkontribusi pada rendahnya keberlanjutan pendidikan dan tingginya angka putus sekolah, terutama pada transisi dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dan dari SMA ke tingkat perguruan tinggi.

Distribusi penduduk Kampung Mimika menurut tingkat pendidikan pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk Kampung Mimika menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		L	P		
1.	Tidak/belum sekolah	112	93	205	39,05
2.	Belum Tamat SD	35	28	63	12,00
3.	Tamat SD	17	12	29	5,52
4.	SLTP	91	89	180	34,29
5.	SLTA	28	14	42	8,00
6.	Diploma I/II	1	1	2	0,38
7.	Akademi/D-III	0	1	1	0,19
8.	D-IV/S-1	2	1	3	0,57
		286	239	525	100

Sumber: Data Agregat SMT-1 Dukcapil, 2025

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kampung Mimika belum menikmati akses pendidikan yang memadai. Data mencatat 39,05% penduduk tidak pernah bersekolah, belum tamat SD 12%, lulusan SD 5,52%, SMP 34,29% dan SMA hanya 8%. Penduduk yang menamatkan sampai tingkat perguruan tinggi hanya 1 %. Komposisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk masih berada pada tingkat pendidikan dasar atau bahkan tidak berpendidikan formal sama sekali (90.86%), sehingga kapasitas literasi dan keterampilan dasar masyarakat masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat jelas bahwa Kampung Mimika belum memenuhi target Wajib Belajar 9 Tahun, yang minimal mensyaratkan penyelesaian pendidikan hingga jenjang SMP. Rendahnya persentase lulusan SMP dan tingginya jumlah penduduk yang tidak sekolah menunjukkan adanya hambatan serius dalam akses dan keberlanjutan pendidikan, baik dari sisi sarana, dukungan keluarga, maupun kondisi sosial ekonomi. Situasi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan memerlukan intervensi pendidikan yang lebih terarah untuk memutus rantai ketertinggalan.

Akses pendidikan nonformal seperti kursus keterampilan, pendidikan keaksaraan, pelatihan vokasional, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, hanya tersedia di Kota Timika dan hampir tidak pernah diikuti oleh warga Kampung Mimika. Tidak adanya program pendidikan nonformal yang diselenggarakan di kampung menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan

keterampilan dasar, memperluas wawasan, atau mengembangkan kemampuan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal. Akibatnya peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi terbatas, dan sebagian besar penduduk tetap bergantung pada pengetahuan tradisional serta kemampuan lokal.

d. Mata pencaharian/pekerjaan

Mata pencaharian merupakan kegiatan utama yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsep ini juga menggambarkan struktur ekonomi masyarakat, tingkat kemandirian, kemampuan memanfaatkan sumber daya lokal, serta sejauh mana suatu komunitas memiliki akses terhadap kesempatan kerja formal maupun informal.

Distribusi penduduk Kampung Mimika menurut matapencaharian pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Mimika menurut Mata Pencaharian Tahun 2025

No.	Matapencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Belum Bekerja	430	81,90
2.	Aparatur Pejabat Negara	4	0,76
3.	Tenaga Pengajar	0	0,00
4.	Wiraswasta	11	2,10
5.	Petani/Pekebun	57	10,86
6.	Nelayan	23	4,38
	Jumlah	525	100

Sumber: Data Agregat SMT-1 Dukcapil, 2025

Data tabel di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi kampung Mimika yang masih didominasi aktivitas subsisten dan keterbatasan kesempatan kerja formal. Sebagian besar penduduk (81,90%) tidak bekerja yang di dalamnya mencakup ibu rumah tangga menggambarkan peran domestik yang cukup besar dalam struktur rumah tangga dan sebagai pelajar/ mahasiswa. Matapencaharian utama terkait langsung dengan sumber daya alam terdiri dari nelayan (4,38%) dan petani (10,86%), yang umumnya bekerja mengikuti musim serta kondisi lingkungan pesisir dan daratan. Pekerjaan formal masih sangat terbatas sebagai pedagang (2,10%) yang keseluruhannya warga pendatang dan ASN (0,76%).

Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa mata pencaharian penduduk Kampung Mimika masih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi tradisional. Dominasi nelayan dan petani tradisional serta rendahnya proporsi pekerjaan formal menunjukkan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang lebih mapan. Struktur matapencaharian tersebut menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat kampung Mimika pada sektor informal serta perlunya pengembangan keterampilan dan diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk kampung.



e. Status sosial ekonomi

Sebagian besar penduduk Kampung Mimika masih berada pada kategori miskin, dengan ciri keterbatasan pendapatan, minimnya aset produktif dan ketergantungan pada matapencaharian subsisten. Kelompok menengah terdiri dari rumah tangga yang memiliki pekerjaan lebih stabil seperti pedagang kios dan ASN. Sementara itu, penduduk yang masuk kategori sejahtera jumlahnya sangat terbatas dan umumnya memiliki sumber pendapatan tetap atau usaha kecil yang berkembang.

Akses terhadap layanan dasar masih belum optimal, walaupun terdapat sumur gali tetapi namun airnya hanya digunakan untuk mencuci. Pemenuhan air bersih bergantung pada sumber alami dan penampungan hujan sehingga tidak selalu stabil. Listrik telah tersedia, tetapi pemanfaatannya terbatas oleh daya dan kemampuan biaya rumah tangga. Layanan kesehatan hanya dapat diakses melalui fasilitas Puskesmas di tingkat distrik atau Kota Timika, sehingga jarak dan transportasi menjadi kendala utama bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat.

f. Agama dan lembaga keagamaan

Keberagaman agama di Kampung Mimika menggambarkan dinamika sosial yang telah tumbuh sejak awal masuknya ajaran iman di wilayah Kabupaten Mimika. Pemahaman warga tentang agama berakar dari sejarah panjang kehadiran

para misionaris Belanda yang mulai mengenalkan agama Katolik di Kokonao pada dekade 1920-an, kemudian diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam pembentukan jati diri dan karakter masyarakat setempat.

Sebagian besar penduduk Kampung Mimika (93,52%) memeluk agama Katolik, yang menjadi agama utama dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan praktik keagamaan, dengan umat tersebar dalam dua Komunitas Basis (Kombas) di bawah Paroki Maria Bintang Laut Kokonau. Gereja berperan sebagai pusat kegiatan rohani sekaligus ruang pemersatu yang memperkuat rasa kebersamaan di antara warga, sementara nilai-nilai Katolik membentuk etika sosial, pola hubungan antarwarga, dan cara masyarakat merespons tantangan hidup. Distribusi penduduk Kampung Mimika menurut agama tahun 2025 disajikan dalam tabel pada bagian berikut.

Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Mimika menurut Agama Tahun 2025

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Katolik	491	93,52
2.	Protestan	23	4,38
3.	Islam	11	2,10
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah	525	100

Sumber: Data Agregat SMT-1 Dukcapil, 2025

Selain umat Katolik, terdapat juga sebagian penduduk pendatang yang beragama Islam dan Protestan. Kelompok pendatang ini umumnya bekerja sebagai pedagang, guru, atau tenaga kesehatan yang datang untuk mengabdikan dan tinggal baik sementara maupun dalam jangka waktu lebih lama. Kehadiran mereka memperkaya keragaman sosial yang tetap terjaga secara harmonis, di mana setiap pemeluk agama dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya dengan tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati antarwarga.

4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk

a. Migrasi masuk (*in-migration*)

Arus mobilitas penduduk dari kampung-kampung sekitar menuju Kampung Mimika relatif mudah karena didukung keberadaan beberapa dermaga umum yang

berfungsi sebagai pintu masuk utama transportasi sungai. Fasilitas dermaga ini mempermudah warga dari kampung tetangga maupun dari Kota Timika untuk keluar-masuk Mimika, baik untuk urusan sehari-hari maupun kegiatan khusus.

Mayoritas pengunjung berasal dari Timika dengan tujuan utama menjenguk keluarga, mengikuti perayaan keagamaan, atau terlibat dalam upacara adat yang diselenggarakan di kampung. Sementara itu, kehadiran penduduk non-OAP umumnya berkaitan dengan penugasan tertentu, seperti pelayanan pemerintahan, pekerjaan teknis, atau misi kelembagaan lainnya. Meskipun lalu lintas orang yang datang cukup rutin, perubahan yang ditimbulkan terhadap struktur sosial, pola relasi komunitas, dan aktivitas ekonomi lokal relatif kecil; tatanan adat, ikatan solidaritas antar marga, dan sistem ekonomi kampung tetap terjaga dan berjalan sebagaimana biasanya.

b. Migrasi keluar (*out-migration*)

Warga Kampung Mimika juga melakukan perpindahan ke luar kampung menuju wilayah perkotaan, terutama ke Timika, dengan berbagai tujuan. Sebagian tinggal dalam jangka waktu lebih lama karena bekerja atau menempuh pendidikan, sementara yang lain hanya berada di kota untuk sementara, lalu kembali setelah menyelesaikan urusan seperti kunjungan keluarga, koordinasi pemerintahan, atau pelayanan keagamaan.

Mobilitas ini memberi dampak positif bagi kampung melalui kiriman uang (remitansi) dari anggota keluarga yang berada di kota yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun mendukung kegiatan sosial di kampung. Selain itu, hubungan yang terjalin dengan lingkungan perkotaan ikut memperkaya cara pandang, gaya hidup, dan pola komunikasi masyarakat, meskipun tidak sampai menghilangkan atau menggantikan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang sudah mengakar.

c. Mobilitas harian/berkala

Aktivitas mobilitas penduduk Kampung Mimika berlangsung baik secara harian maupun musiman. Warga kerap keluar-masuk kampung untuk berbagai keperluan ekonomi, seperti mengambil hasil kebun, menuju dusun sagu,

menangkap ikan di perairan sekitar, ataupun bepergian ke Timika untuk urusan lainnya.

Pergerakan musiman biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat panen, pengolahan sagu, atau ketika ada kegiatan adat dan perayaan keagamaan di kampung lain yang lokasinya terhubung langsung dengan Mimika. Pola mobilitas seperti ini sudah menjadi bagian dari rutinitas hidup masyarakat dan tidak menimbulkan perubahan tetap terhadap jumlah maupun susunan penduduk kampung.

d. Dinamika perubahan komposisi penduduk

Walaupun terdapat arus penduduk yang datang, pergi, maupun melakukan perjalanan rutin setiap hari, susunan penduduk Kampung Mimika pada dasarnya tetap relatif ajek. Berbagai bentuk mobilitas tersebut tidak membawa perubahan signifikan terhadap struktur demografi maupun terhadap penyusunan program layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, karena jumlah penduduk cenderung stabil dan kapasitas pelayanan publik yang ada masih mampu mengakomodasi kebutuhan warga. Dengan kata lain, pergerakan penduduk yang terjadi lebih merupakan bagian dari dinamika sosial keseharian dan tidak sampai mengubah arah pembangunan maupun pola kehidupan kampung.

D. Pendidikan

1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan

Bagi masyarakat Kampung Mimika, pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang penting karena diyakini dapat memajukan manusia dan membuka jalan keluar dari berbagai keterbatasan hidup. Warga menilai bahwa dengan sekolah yang baik, anak-anak akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih luas, sehingga tidak sekadar “bisa baca tulis”, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersaing dengan orang dari luar kampung. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan warga dalam wawancara yang menekankan bahwa pendidikan membuat manusia menjadi lebih maju, lebih mengerti, dan tidak mudah tertinggal.

Harapan orang tua terhadap anak yang bersekolah umumnya cukup tinggi, anak diharapkan bisa lulus minimal setingkat SMA, kalau memungkinkan melanjutkan

kuliah, lalu memperoleh pekerjaan yang layak, baik di kota maupun di kampung sebagai guru, tenaga kesehatan, pegawai, atau pelayan gereja. Orang tua melihat pendidikan sebagai investasi masa depan yang dapat mengangkat martabat keluarga, membantu orang tua di hari tua, dan menjadi teladan bagi adik-adiknya.

Dalam pemahaman masyarakat, sekolah bukan hanya tempat mencari ijazah, tetapi dipandang sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik, peluang kerja yang lebih luas, dan perubahan status sosial dari “orang kampung biasa” menjadi orang yang dipercaya memegang tanggung jawab di pemerintahan, lembaga gereja, atau dunia kerja formal. Pendidikan dianggap mampu mengubah pola pikir, cara berbicara, dan kepercayaan diri anak, sehingga mereka dapat berdialog dengan pihak luar dan memperjuangkan kepentingan kampung tanpa kehilangan identitas sebagai orang Mimika.

Pendidikan merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dalam jangka panjang berkontribusi pada kemajuan perekonomian. Ketika jenjang pendidikan masyarakat semakin baik, kapasitas dan keterampilan mereka ikut terangkat sehingga mendorong lahirnya jiwa kewirausahaan dan munculnya berbagai peluang kerja baru. Pada akhirnya, kondisi ini mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam upaya pengurangan dan penanggulangan kemiskinan.

2. Kelembagaan Pendidikan

Di Kampung Mimika sendiri belum terdapat bangunan sekolah yang khusus melayani warga kampung; seluruh layanan pendidikan formal dari jenjang TK/PAUD, SD, SMP hingga SMA pada dasarnya terpusat di Kampung Apuri dan Kokonao, dengan pengecualian satu SD Negeri yang berlokasi di Kampung Atapo. Fasilitas-fasilitas ini menjadi tempat belajar bagi anak-anak dari enam kampung di Distrik Mimika Barat, termasuk pelajar asal Kampung Mimika, karena letak kampung-kampung tersebut saling berdekatan sehingga secara geografis masih mudah dijangkau dengan berjalan kaki. Dari pusat pemerintahan Kampung Mimika, waktu tempuh ke SD di Atapo sekitar lima menit berjalan kaki, sedangkan menuju SD yang berada di Apuri kurang lebih lima belas menit. Jarak ke PAUD, SMP, dan SMA di Kokonao dan Apuri pun rata-rata hanya sekitar sepuluh hingga lima belas menit perjalanan kaki.

Kondisi ini membuat akses fisik ke sekolah relatif tidak menjadi hambatan utama, meskipun anak-anak tetap bergantung pada fasilitas yang terpusat di kampung lain, sehingga kebutuhan akan peningkatan mutu layanan, ketersediaan guru, dan dukungan belajar menjadi isu penting dalam pengembangan pendidikan bagi masyarakat Kampung Mimika.

E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana

1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit, dan Penyakit

a. Pemaknaan “sehat” menurut masyarakat

Pengetahuan kesehatan di Kampung Mimika pada dasarnya dipahami secara fungsional, yakni kesehatan diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk tetap menjalankan kegiatan harian. Seseorang dianggap sehat selama masih sanggup bekerja, pergi ke kebun, mendayung perahu, mencari ikan, mengurus rumah tangga, dan memenuhi peran ekonomi dalam keluarga. Selama tidak ada keluhan fisik yang dirasa mengganggu aktivitas, kondisi tersebut dipersepsikan sebagai sehat, sehingga kesehatan dipandang terutama dari sejauh mana seseorang masih bisa bergerak dan memberi kontribusi bagi rumah tangga.

Dalam hal kesehatan ibu dan anak, kehamilan umumnya dimaknai sebagai proses alamiah dan anugerah yang akan berjalan sendiri sampai waktu melahirkan sekitar “sembilan bulan sepuluh hari”. Karena dianggap wajar dan tidak selalu membutuhkan dukungan layanan medis, sebagian perempuan hamil jarang melakukan pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan atau tenaga medis. Pola ini menyebabkan pemantauan terhadap kondisi ibu dan janin menjadi terbatas, sehingga potensi risiko kehamilan tidak selalu terdeteksi sejak dini.

Pandangan tersebut juga berdampak pada cara masyarakat menilai status gizi anak. Bayi dengan berat lahir rendah atau balita yang mengalami masalah gizi kerap tetap dipandang “baik-baik saja” selama mereka tampak lincah, aktif, dan masih mau bermain. Dengan demikian, indikasi kurang gizi belum selalu dilihat sebagai persoalan kesehatan yang serius, karena ukuran sehat lebih banyak didasarkan pada kemampuan anak untuk beraktivitas sehari-hari daripada pada indikator medis atau pengukuran pertumbuhan tubuh.

b. Pemaknaan “sakit”

Masyarakat Kampung Mimika memaknai penyakit melalui dua ranah utama, yaitu gangguan yang bersifat fisik dan sakit yang berkaitan dengan dimensi spiritual maupun pelanggaran adat. Kedua cara pandang ini membentuk cara mereka membaca gejala dan menentukan jalur penyembuhan yang dipilih, apakah cukup dengan perawatan biasa, perlu obat medis, atau membutuhkan bantuan tokoh adat dan agama.

Sakit fisik biasanya dikaitkan dengan pengaruh lingkungan dan pola hidup sehari-hari. Keluhan yang sering muncul antara lain demam dan tubuh terasa lemah yang kerap dihubungkan dengan malaria, batuk karena paparan debu, serta luka-luka akibat aktivitas di kebun, sungai, atau hutan. Berbagai penyakit ini dianggap bagian dari risiko hidup sehari-hari dan umumnya lebih dulu diatasi dengan langkah-langkah sederhana di rumah sebelum keluarga memutuskan mencari layanan kesehatan formal.

Di sisi lain, terdapat keyakinan bahwa sebagian penyakit bersumber dari gangguan dunia gaib atau konsekuensi pelanggaran norma adat. Dalam kerangka kepercayaan lokal, sakit bisa dipandang sebagai akibat gangguan roh, terganggunya hubungan harmonis dengan alam, atau reaksi terhadap tindakan yang dipandang melawan aturan adat. Dalam situasi demikian, keluarga cenderung menghubungi tokoh adat atau pemuka agama untuk memohon doa, ritual, atau mediasi spiritual, yang dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau bahkan menggantikan upaya berobat ke tenaga medis.

Gejala awal seseorang dinilai mulai tidak sehat biasanya terlihat dari perubahan tubuh yang dirasa janggal oleh yang bersangkutan maupun keluarga. Rasa panas-dingin sering ditafsirkan sebagai “kena angin lewat” atau pengaruh “angin jahat”, sedangkan lelah berlebihan atau pusing kerap dihubungkan dengan pengalaman “salah jalan” ketika melintasi tempat-tempat yang diyakini punya kekuatan tertentu. Cara memahami gejala seperti ini mendorong keluarga untuk terlebih dahulu melakukan penanganan tradisional, misalnya pijat, pemberian ramuan, atau ritual sederhana, sebelum mempertimbangkan membawa pasien ke fasilitas kesehatan modern.

2. Kesehatan

a. Jenis dan ketersediaan fasilitas kesehatan

Akses layanan kesehatan bagi warga Kampung Mimika masih tergolong sangat terbatas. Fasilitas kesehatan tingkat pertama hanya tersedia di ibu kota distrik, sedangkan unit layanan dasar seperti Puskesmas Pembantu, Poskesdes, maupun Polindes belum hadir di wilayah kampung. Di tingkat kampung, satu-satunya layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah Posyandu yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil dan balita. Namun, pemanfaatan Posyandu juga belum optimal karena kegiatan hanya berlangsung sekitar satu kali dalam sebulan dan sangat bergantung pada kedatangan petugas kesehatan dari Puskesmas distrik yang terjadwal datang ke Kampung Mimika.

b. Tenaga kesehatan yang tersedia

Tenaga kesehatan yang melayani warga Kampung Mimika berasal dari Puskesmas tingkat distrik dan umumnya terdiri atas perawat, bidan, serta petugas gizi, dengan dukungan dokter umum untuk pemeriksaan dan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi di tingkat distrik. Kehadiran mereka di kampung bersifat tidak menetap, melainkan melalui kunjungan berkala sesuai jadwal bulanan yang biasanya bertepatan dengan kegiatan Posyandu.

Pola pelayanan seperti ini menimbulkan tantangan besar ketika terjadi sakit mendadak atau kondisi gawat darurat, karena keterbatasan sarana transportasi membuat akses ke layanan kesehatan sulit dan tidak selalu cepat. Banyak ibu hamil baru mencari pertolongan medis ketika kondisinya sudah berat, sehingga risiko komplikasi kehamilan dan persalinan menjadi lebih tinggi, sementara sebagian masih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun kampung sehingga persalinan di fasilitas kesehatan relatif rendah.

Dari pengamatan lapangan, gejala yang mengarah pada stunting pada anak dan anemia pada ibu hamil sudah tampak di Kampung Mimika, namun belum ada sistem pengukuran dan pemantauan status gizi yang dilakukan secara rutin dan terstruktur, sehingga masalah gizi ini berpotensi tidak tercatat dan tidak tertangani dengan baik.

3. Gizi

a. Akses pangan bergizi

Pola pemenuhan pangan bergizi di Kampung Mimika masih sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam di sekitar permukiman. Lauk hewani umumnya berasal dari hasil tangkapan sungai seperti ikan, udang, dan kepiting yang dapat diperoleh relatif mudah tanpa mengeluarkan uang, sementara bahan pangan hewani yang harus dibeli seperti ayam dan telur jarang dikonsumsi karena harganya dianggap berat bagi banyak rumah tangga.

Untuk kebutuhan karbohidrat, masyarakat lebih banyak mengonsumsi pangan lokal seperti sagu dari dusun sagu, ubi dari lahan kering, dan sayur-mayur hutan yang sifatnya musiman, sehingga ragam makanan yang dikonsumsi sehari-hari masih terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan pola gizi seimbang. Di sisi lain, beras masih menjadi komoditas penting yang sebagian besar diperoleh dari bantuan pemerintah, sehingga ketika bantuan tersendat atau akses transportasi ke Timika terganggu, ketahanan pangan keluarga menjadi sangat rentan.

Situasi ini berpengaruh pada pola makan yang cenderung sederhana dan kurang bervariasi, terutama bagi kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil yang seharusnya mendapatkan asupan gizi lebih lengkap dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka secara optimal.

b. Program gizi di kampung

Pelaksanaan program gizi di Kampung Mimika masih dibayangi berbagai kendala sehingga belum berjalan optimal. Posyandu balita yang seharusnya menjadi garda terdepan layanan gizi belum dapat secara optimal menerapkan sistem lima meja secara penuh karena keterbatasan kader terlatih dan kurangnya sarana pendukung.

Kegiatan penimbangan berat badan balita memang tetap dilakukan setiap kali Posyandu berjalan, tetapi tingkat kehadiran anak masih rendah karena tidak semua ibu membawa balitanya secara rutin. Di sisi lain, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) hampir selalu diupayakan ketika tersedia bahan atau dukungan dari tenaga kesehatan, dengan menu yang umumnya sederhana dan disusun berdasarkan bahan pangan yang ada di kampung.

c. Perilaku dan pengetahuan gizi keluarga

Pengetahuan gizi keluarga di Kampung Mimika pada umumnya masih terbatas sehingga pola makan sehari-hari cenderung sederhana dan kurang beragam. Makanan yang disiapkan di rumah jarang dibedakan menurut kelompok umur, sehingga balita dan orang dewasa kerap mengonsumsi menu yang sama, biasanya berupa nasi dengan sedikit lauk dan minim sayuran. Kebiasaan makan bersama dalam satu meja keluarga belum terbentuk kuat, dan balita umumnya disuapi oleh ibu tanpa perhitungan porsi maupun pertimbangan kandungan gizi.

Di sisi lain, berbagai mitos dan pantangan makanan turut memengaruhi pola konsumsi, khususnya bagi ibu hamil. Sejumlah bahan pangan hewani seperti penyu (*teteruga*), udang, daging buaya, dan tikus tanah dihindari karena diyakini dapat menimbulkan bentuk tubuh bayi yang tidak normal, misalnya kaki berbentuk O, cacar air, jari berlebih, atau telinga panjang. Akibatnya, sebagian ibu hamil mengurangi atau meninggalkan beberapa sumber protein hewani yang sebenarnya penting, sehingga asupan gizinya menjadi kurang seimbang dan berpotensi meningkatkan risiko anemia serta gangguan pertumbuhan janin.

d. Ketersediaan sumber pangan lokal

Ketersediaan pangan lokal di Kampung Mimika terutama bersumber dari dusun sagu yang menjadi lokasi utama pengambilan tepung sagu sebagai makanan pokok masyarakat. Warga umumnya belum memiliki kebun keluarga yang dikelola secara khusus, sehingga kebutuhan sayur-sayuran lebih banyak ditopang oleh hasil alam yang kebetulan tersedia atau melalui pembelian dari luar kampung. Di sisi lain, sumber pangan perairan cukup berlimpah, dengan berbagai jenis ikan sungai, udang, dan kepiting yang menjadi penopang utama kebutuhan protein hewani warga.

Namun, ketahanan pangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh dinamika alam setempat. Pada periode pasang besar, air laut dapat masuk hingga ke rumah-rumah sehingga mengganggu aktivitas memasak maupun pengolahan sagu, sekaligus membuat tanaman sayuran sulit tumbuh karena lahan tergenang. Dalam situasi seperti ini, warga terpaksa lebih bergantung pada pasokan sayur dari Kota Timika dengan biaya yang lebih tinggi, sehingga masa pasang besar sering kali

menjadi periode rawan pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan lokal masih rapuh dan sangat bergantung pada musim serta kemudahan akses transportasi.

4. Keluarga Berencana

a. Pemahaman masyarakat tentang KB

Pemahaman dasar masyarakat Kampung Mimika tentang program Keluarga Berencana (KB) sebenarnya sudah sejalan dengan tujuan umum KB, yaitu mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu, dan mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari, terutama di kalangan pasangan usia subur, sehingga masih banyak keluarga yang memiliki anak dalam jumlah cukup banyak dengan jarak kelahiran yang berdekatan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kehamilan berulang dan kejadian bayi dengan berat lahir rendah.

Sebagian pasangan usia subur memang sudah menjadi peserta KB dan menggunakan alat kontrasepsi, tetapi di sisi lain masih terdapat pandangan bahwa kontrasepsi modern kurang selaras dengan nilai adat atau keyakinan yang dianut. Alat kontrasepsi kerap dipersepsikan sebagai “benda asing” yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga menimbulkan rasa ragu dan penolakan, terutama di kalangan pasangan muda dan ibu yang baru melahirkan. Cara pandang ini ikut menghambat penerimaan metode KB modern secara lebih luas, meskipun tujuan utamanya adalah melindungi kesehatan ibu dan kualitas kehidupan keluarga.

b. Akses layanan KB

Layanan Keluarga Berencana (KB) bagi warga Kampung Mimika pada praktiknya hanya dapat diakses melalui Puskesmas Kokonau yang menyediakan berbagai jenis alat kontrasepsi serta tenaga kesehatan untuk melakukan penyuluhan dan tindakan pemasangan.

Walaupun sarana dasar KB sebenarnya sudah tersedia di tingkat puskesmas, pemanfaatannya masih terbatas karena jarak yang jauh, frekuensi layanan kunjungan yang tidak rutin, serta kegiatan penyuluhan yang masih jarang dilakukan. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara

kebutuhan akan layanan KB dengan jumlah pasangan yang benar-benar menggunakan layanan tersebut di masyarakat.

c. Frekuensi kelahiran dan tren keluarga

Pola keluarga di Kampung Mimika masih didominasi oleh keluarga besar, dengan rata-rata 3-6 anak dalam satu rumah tangga yang mencerminkan kuatnya nilai budaya tentang banyak anak sebagai sumber tenaga dan penerus marga/klan. Dukungan keluarga terhadap kesehatan ibu dan anak pada dasarnya cukup tinggi, namun tetap dibingkai oleh pola peran gender tradisional di mana keputusan utama banyak berada di tangan laki-laki.

Dalam praktik sehari-hari, perempuan memikul beban ganda sebagai pihak yang menjalankan fungsi reproduksi sekaligus menjadi tenaga kerja produktif dalam rumah tangga, sementara keterlibatan laki-laki dalam keputusan terkait reproduksi, penggunaan KB, dan pola pengasuhan anak cenderung masih pasif. Situasi ini berpengaruh langsung terhadap dinamika keluarga dan frekuensi kelahiran, sehingga penataan ulang peran dalam keluarga serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya KB dan kesehatan reproduksi menjadi agenda kunci untuk memperbaiki derajat kesehatan ibu dan anak di Kampung Mimika.

F. Ekonomi Masyarakat

1. Aktivitas Penduduk

Aktivitas ekonomi utama masyarakat Kampung Mimika sangat dipengaruhi oleh karakter pesisir dan sungai, dengan kombinasi kegiatan menangkap ikan, mengolah sagu, berkebun, meramu hasil hutan, serta sedikit usaha dagang kecil dan kerja upahan. Nelayan lokal memanfaatkan sungai, muara, dan perairan pesisir untuk menangkap ikan, udang, dan hasil laut lain, sementara di darat keluarga mengelola kebun campuran, dusun sagu, serta mengumpulkan kerang, tambelo, dan hasil alam lain sebagai sumber pangan dan pendapatan. Sebagian warga kampung, terutama generasi muda, juga mulai terlibat dalam pekerjaan sektor jasa atau proyek, misalnya buruh bangunan dan pelabuhan saat bongkar muat barang, tenaga di program desa, atau kegiatan yang terkait program lembaga keagamaan dan perusahaan, meskipun skala keterlibatannya masih terbatas.

Dilihat dari pembagian waktu, aktivitas ekonomi berlangsung secara harian dan musiman sekaligus. Setiap hari warga dapat berangkat pagi untuk melaut, menjaring ikan di sungai, atau ke kebun dan dusun sagu, lalu kembali siang atau sore untuk mengolah dan mengonsumsi sebagian hasil, sementara sisanya dijual di kampung atau dibawa ke pusat perdagangan terdekat. Pada musim-musim tertentu, seperti musim ikan ramai, musim panen sagu atau hasil kebun, intensitas kerja meningkat karena keluarga menghabiskan lebih banyak waktu di lokasi sumber daya (dusun sagu, pondok kebun, atau camp sungai), sedangkan pada hari raya keagamaan dan agenda adat besar, aktivitas ekonomi bisa menurun karena tenaga difokuskan pada persiapan upacara dan kegiatan sosial.

Pembagian peran berdasarkan gender dan kelompok umur juga cukup jelas. Laki-laki umumnya lebih dominan dalam aktivitas melaut dan menangkap ikan di perairan yang jauh atau berarus kuat, menebang batang sagu, serta melakukan pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga fisik, sementara perempuan memegang peran penting dalam memproses sagu, menanam dan merawat kebun, mengumpulkan kerang, serta mengolah dan menjual hasil produksi rumah tangga. Pemuda dan remaja seringkali berada di posisi antara: membantu orang tua di kebun, ikut melaut, sekaligus terlibat dalam pekerjaan kasual seperti buruh proyek, ojek perahu, atau aktivitas ekonomi baru yang memerlukan mobilitas dan keterampilan dasar, sehingga mereka menjadi jembatan antara pola kerja tradisional dan kesempatan kerja modern.

Dari sisi pola kerja, sistem tradisional seperti “3S” (sagu, sungai, sampan) masih menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi, namun mulai berdampingan dengan pola kerja yang lebih modern seperti keterlibatan dalam koperasi nelayan, program pemberdayaan perikanan, atau kegiatan yang difasilitasi pemerintah dan lembaga lain. Nelayan Kamoro misalnya, tetap memakai alat tangkap sederhana yang ramah lingkungan, tetapi mulai didorong untuk lebih teratur melaut dan menjual hasil ke unit pengolahan atau koperasi agar pendapatan lebih stabil sepanjang tahun. Jam kerja biasanya dimulai pagi hari menyesuaikan pasang surut dan cuaca, dengan lokasi kerja tersebar di sungai, hutan mangrove, dusun sagu, dan kebun, sehingga ketergantungan pada sektor informal, alam, dan musim masih sangat tinggi dalam struktur ekonomi kampung.

Untuk menambah pendapatan, banyak keluarga menjalankan aktivitas sampingan di luar mata pencaharian utama, seperti membuka warung kecil, menjual ikan asap atau ikan kering, membuat kerajinan ukir dan anyaman, menjadi tenaga angkut di dermaga, atau memanfaatkan peluang proyek jangka pendek yang datang dari program desa, gereja, maupun lembaga lain. Aktivitas tambahan ini penting karena membantu rumah tangga menghadapi fluktuasi hasil laut dan sagu, sekaligus memberi ruang bagi anggota keluarga terutama perempuan dan pemuda untuk berinovasi dalam usaha kecil-kecilan tanpa meninggalkan basis ekonomi tradisional yang sudah mengakar kuat di Kampung Mimika.

2. Kepemilikan Modal

Kepemilikan modal produktif di Kampung Mimika masih sangat sederhana dan didominasi oleh aset yang terkait langsung dengan aktivitas perikanan dan pengelolaan sumber daya alam. Perahu yang digunakan masyarakat lokal untuk melaut dan bertransportasi umumnya berasal dari bantuan Dana Desa, sedangkan kepemilikan perahu pribadi yang benar-benar dibeli sendiri lebih banyak ditemukan pada warga pendatang yang memiliki modal lebih kuat. Selain perahu, sebagian rumah tangga memiliki alat tangkap tradisional sederhana dan sedikit peralatan pertanian atau mesin, sementara kepemilikan kios usaha hanya terdapat pada warga pendatang, masyarakat asli Kamoro belum banyak yang memiliki kios sebagai unit usaha tetap sehingga lebih bergantung pada hasil tangkap dan kebun.

Dari sisi aset rumah tangga, masyarakat Kampung Mimika rata-rata belum memiliki kendaraan bermotor seperti motor dan mobil, sehingga mobilitas masih sangat bergantung pada jalan kaki atau perahu. Dalam satu rumah tangga biasanya sudah terdapat telepon genggam dan beberapa peralatan elektronik dasar seperti *loudspeaker* atau radio, sedangkan kepemilikan ternak hanya dimiliki sebagian kecil keluarga dan lebih berfungsi sebagai tabungan hidup atau cadangan ekonomi darurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa akumulasi aset fisik masih terbatas, dengan prioritas penggunaan pendapatan lebih banyak diarahkan pada konsumsi harian dan kebutuhan pendidikan atau kesehatan dibanding investasi barang bernilai tinggi.

Sumber modal usaha masyarakat pada umumnya berasal dari tabungan keluarga dalam skala kecil yang dikumpulkan secara bertahap dari hasil melaut, berkebun, atau

kerja upahan. Di luar itu, suntikan modal utama justru datang dari bantuan pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program berbasis Dana Desa yang kadang disalurkan dalam bentuk barang (perahu, alat tangkap, ketinting) maupun uang tunai untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu. Akses ke lembaga keuangan formal seperti bank hanya ada 1 saja untuk distrik ini yaitu di Kampung Atopo, sedangkan koperasi simpan pinjam dan atau kredit usaha belum beroperasi menunggu waktu peresmian, sehingga modal finansial warga sangat bergantung pada dana pemerintah dan jaringan keluarga, bukan pada skema pembiayaan yang terstruktur.

Pengelolaan modal yang ada cenderung bersifat konsumtif produktif sekaligus, bantuan perahu dan alat tangkap digunakan langsung untuk mencari nafkah harian, sementara bantuan tunai sering dibagi antara belanja kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, dan sedikit porsi untuk usaha kecil seperti jual ikan atau hasil olahan. Keberlanjutan modal produktif sangat dipengaruhi kemampuan warga merawat perahu dan alat tangkap, jika terjadi kerusakan berat dan tidak ada dana untuk memperbaiki, kapasitas produksi akan turun karena tidak ada cadangan modal. Hal ini membuat ketahanan ekonomi masyarakat rentan terhadap guncangan, dan sangat membutuhkan pendampingan agar bantuan modal tidak habis terpakai hanya untuk konsumsi sesaat.

Dari perspektif pemerataan, tampak adanya ketimpangan kepemilikan modal antara warga asli dan pendatang, maupun antar rumah tangga. Warga pendatang umumnya lebih banyak memiliki kios, perahu bermesin yang lebih baik, dan akses barang modal lain, sementara sebagian besar keluarga asli kampung Mimika hanya bergantung pada perahu bantuan dan alat tangkap sederhana tanpa memiliki usaha dagang tetap. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jarak ekonomi jika tidak diimbangi dengan program pemberdayaan yang secara khusus memperkuat modal produktif dan kapasitas usaha masyarakat asli Kampung Mimika agar dapat bersaing dan menikmati manfaat ekonomi dari potensi laut dan sumber daya alam di wilayah mereka sendiri.

3. Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi di Kampung Mimika masih sangat sederhana dan bertumpu pada unit-unit usaha kecil yang tumbuh secara spontan. Lembaga ekonomi yang benar-benar hadir di tingkat kampung terutama berupa kios kampung milik

warga pendatang, lapak penjualan pinang yang buka-tutup mengikuti ketersediaan



barang dan pembeli, serta pasar kampung yang berfungsi sebagai ruang transaksi hasil tangkap, hasil kebun, dan kebutuhan pokok. Struktur koperasi, kelompok tani/nelayan formal, atau BUMK/Bumkam belum berkembang kuat di Kampung Mimika, sehingga

pengorganisasian ekonomi lebih banyak berjalan secara individual atau berbasis keluarga.

Dalam situasi seperti ini, efektivitas lembaga ekonomi lokal dalam meningkatkan pendapatan warga masih terbatas. Kios kampung dan pasar memang



membantu menyediakan barang kebutuhan dan menjadi tempat menjual ikan, sagu, dan hasil kebun, tetapi keuntungan utama biasanya dinikmati pemilik kios (umumnya pendatang) karena mereka menguasai modal barang dagangan. Bagi masyarakat asli, lembaga

ini lebih berfungsi sebagai saluran pemasaran dan tempat belanja, bukan sebagai wadah penguatan posisi tawar atau peningkatan nilai tambah produksi.

Di luar lembaga formal, tata kelola ekonomi lokal banyak dipengaruhi praktik adat dan kesepakatan tidak tertulis, misalnya sistem bagi hasil dalam penggunaan perahu, pembagian hasil tangkap, atau kerja bersama di dusun sagu dan kebun. Pola-pola ini biasanya diatur berdasarkan hubungan kekerabatan dan kepercayaan, seperti pemilik perahu yang mendapat bagian lebih besar sementara pengemudi atau pengangkat jaring menerima bagian sesuai tenaga dan perannya, atau keluarga besar yang berbagi hasil sagu setelah bekerja bersama di satu lokasi ulayat. Sistem ini membantu memastikan pemerataan minimal di dalam jaringan kerabat, namun belum selalu terhubung dengan kelembagaan ekonomi modern yang dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.

Tingkat keaktifan kelembagaan ekonomi modern di Kampung Mimika masih rendah, sehingga partisipasi warga lebih banyak muncul dalam bentuk aktivitas harian di pasar dan jaringan jual beli informal antar rumah tangga. Tanpa koperasi atau kelompok usaha yang terstruktur, posisi tawar nelayan dan petani tetap lemah terhadap pemilik modal kios dan pembeli dari luar kampung, dan sulit untuk melakukan pembelian bersama, pengolahan bersama, atau negosiasi harga secara kolektif.

Dukungan eksternal terhadap ekonomi Kampung Mimika terutama datang dari pemerintah dan lembaga keagamaan. Pemerintah desa dan kabupaten menyalurkan bantuan melalui Dana Desa, dan BLT. Sementara itu gereja berperan mendorong kesadaran kerja keras, pengelolaan keuangan keluarga, serta kadang memfasilitasi kelompok kecil binaan atau kegiatan pelatihan sederhana. Kampung Mimika masih mengandalkan kombinasi dukungan pemerintah dan gereja serta inisiatif mandiri warga, sehingga penguatan kelembagaan ekonomi ke depan menjadi salah satu tantangan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Harga Barang dan Bahan Makanan

Secara umum, pola harga di kampung cenderung relatif stabil sepanjang tahun, dan baru mengalami perubahan berarti bila terjadi kondisi tertentu, misalnya pasokan berkurang, cuaca ekstrem, atau gangguan produksi di kebun dan dusun.

Fluktuasi harga di pasar kampung lebih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan barang dan faktor cuaca, karena hampir semua sayuran dan beberapa komoditas lain ditanam sendiri oleh warga di pekarangan rumah dengan pola “hidroponik tradisional” atau diambil dari dusun dan kebun. Ketika hasil panen melimpah, harga sayur dan beberapa bahan lokal dapat turun karena pasokan banyak, sebaliknya pada saat hujan berkepanjangan atau gagal panen, harga naik karena jumlah barang sedikit dan pasokan dari luar kampung juga terbatas. Untuk barang-barang yang dijual di kios milik warga pendatang (seperti beras kemasan, minyak pabrikan, gula, dan produk pabrikan lain), harga dapat melonjak tiba-tiba pada situasi tertentu, misalnya ketika masyarakat baru saja menerima bantuan tunai atau sembako, sehingga kekuatan tawar pembeli menjadi lemah.

Di kampung Mimika, harga berbagai kebutuhan yang dijual pada kios-kios maupun pasar kampung dapat dilihat pada data tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Harga Kebutuhan SEMBAKO, Pakaian dan Sekolah
Di Kampung Mimika Tahun 2025

No.	Jenis Komoditas	Harga (Rp)/Satuan	Keterangan
I	Sayuran, buah, ubi, hasil laut		
01.	Kangkung dan bayam	5.000/ikat	Kecil/besar
02.	Tomat	5.000/tumpuk	
03.	Cabe	5.000/tumpuk	
04.	Pisang	20.000/sisir	Kecil/besar
05.	Ubi-ubian	50.000/tumpuk	
06.	Sagu	30.000/potong	
07.	Ikan basah	15.000/ekor	
08.	Udang Laut	45.000/kg	
09.	Udang Kali	3.000/ekor	
10.	Karaka	30.000/ekor	
II	Jenis sembilan bahan pokok		
01.	Beras	18.000/kg	
02.	Gula pasir	25.000/kg	
03.	Garam	9.000/bungkus	
04.	Minyak goreng	30.000/liter	
05.	Minyak tanah	15.000/liter	
06.	Susu kaleng	12.000/kaleng	Cap Nona
07.	Supermi	5.000/bungkus	
08.	Kopi	8.000/bungkus	
09.	Telur	5.000/buah	
10.	Sabun	5.000/batang	
III	Jenis rokok		
01.	Gudang garam filter kecil	35.000/bungkus	
02.	Gudang garan filter besar	45.000/bungkus	
03.	Shag jenis anggur Kupu	8.000/bungkus	
04.	TROY	35.000/bungkus	
IV	Pakain dan alat tulis		
01.	Baju T-shirt	60.000/buah	<i>All Size</i>
02.	Kemeja	60.000/buah	
03.	Kain sarung	50.000/buah	
04.	Buku tulis	3.000/buah	
05.	Bolpoint	5.000/buah	
06.	Pensil	3.000/buah	
V	Jenis usaha pertanian		
01.	Kelapa	1.000/buah	
VI	Jenis bahan bakar minyak (BBM)		
01.	Bensin	18.000/liter	
02.	Minyak tanah	15.000/liter	

Sumber: Data Primer, 2025

Jika dibandingkan dengan Timika sebagai pusat kota terdekat, harga barang di kampung umumnya sedikit lebih tinggi, terutama untuk barang yang seluruhnya

didatangkan dari luar, karena harus menanggung biaya angkut dan risiko cuaca selama distribusi. Namun, untuk komoditas lokal seperti ikan segar dan beberapa jenis sayur kampung, harga di Mimika bisa lebih terjangkau dibanding pasar kota karena dihasilkan langsung oleh warga tanpa rantai distribusi panjang. Akses masyarakat terhadap pasar kampung sendiri sangat mudah, lokasi pasar dapat dijangkau hanya dengan berjalan kaki sekitar lima menit dari rumah-rumah warga, sehingga biaya transportasi hampir tidak menjadi beban tambahan dalam pembentukan harga di tingkat konsumen.

5. Potensi dan Peluang Ekonomi

Potensi sumber daya alam di Kampung Mimika sangat besar, terutama dari sagu, ikan, udang, kepiting bakau, hasil kebun, dan ekosistem mangrove yang terus berkembang di sekitar muara. Wilayah pesisir ini memang rentan terhadap angin laut kencang dan gelombang tinggi pada musim timur (Mei-Agustus) yang kadang menyebabkan banjir rob dan merusak tanaman jangka pendek, serta menghambat pencarian kepiting bakau saat air pasang tinggi, namun di sisi lain proses sedimentasi di muara sejak 1970-an memicu tumbuhnya vegetasi mangrove baru yang menjadi habitat penting biota perikanan dan membuka peluang perikanan, pemanfaatan hasil hutan non kayu, dan wisata alam mangrove. Perubahan kondisi lingkungan di kampung tidak murni alami, tetapi juga dipengaruhi campur tangan manusia melalui pembukaan lahan, aktivitas pemukiman, dan berbagai intervensi pembangunan di wilayah pesisir Mimika.

Di bidang budaya, Kampung Mimika memiliki potensi yang kuat untuk pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal, seperti kerajinan ukir (termasuk gaya seni ukir Kamoro), pembuatan pernak-pernik etnik, tarian tradisional seperti Seka, serta kuliner lokal berbasis sagu dan hasil laut. Tarian, musik, dan ritual adat yang masih hidup dapat dikemas menjadi atraksi ekowisata budaya, di mana pengunjung tidak hanya menikmati alam pesisir dan mangrove, tetapi juga belajar tentang sejarah kampung, seni ukir, prosesi pengolahan sagu, dan cara hidup masyarakat setempat. Jika dikelola baik, potensi ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi kelompok pemuda, perempuan, dan pengrajin, sambil tetap menjaga nilai-nilai sakral adat.

Peluang ekonomi yang bisa dikembangkan cukup beragam, mulai dari agroforestri berbasis sagu, budidaya ikan dan kepiting bakau di sekitar mangrove, dan jasa transportasi kampung menggunakan perahu. Kondisi pasang surut, angin dan gelombang yang kuat perlu dijadikan dasar perencanaan, misalnya dengan memilih komoditas yang tahan genangan, membangun pondok kerja yang aman, dan mengatur jadwal melaut serta pengangkutan barang sesuai musim, sehingga usaha ekonomi tetap berjalan meski menghadapi risiko alam tahunan.

Meski demikian, banyak potensi tersebut masih belum tergarap optimal akibat keterbatasan modal, keterampilan teknis, akses pasar, serta belum adanya kelembagaan ekonomi yang kuat di tingkat kampung. Risiko abrasi, banjir rob, dan rusaknya tanaman jangka pendek saat musim timur juga menjadi tantangan, sehingga masyarakat cenderung bertahan pada pola pemanfaatan harian dan musiman tanpa banyak investasi jangka panjang. Pengembangan wisata alam dan budaya, pengolahan sagu skala kecil-menengah, serta budidaya perikanan yang ramah lingkungan memerlukan pendampingan teknis dan perencanaan ruang pesisir yang memperhitungkan dinamika angin, gelombang, dan sedimentasi agar tidak merusak ekosistem mangrove yang justru menjadi benteng alami kampung.

Dukungan eksternal untuk pengembangan ekonomi di wilayah Mimika selama ini terutama datang dari pemerintah dan lembaga berbasis gereja/keagamaan. Pemerintah kabupaten dan desa menyediakan program bantuan alat tangkap, dukungan pengolahan sagu, serta promosi ekonomi berbasis sumber daya alam lokal, sementara gereja dan lembaga mitra sering berperan dalam pelatihan, pengorganisasian kelompok, dan penguatan etika pengelolaan alam secara berkelanjutan. Kolaborasi seperti ini, bila menjangkau langsung Kampung Mimika dan disesuaikan dengan karakter pesisir yang dinamis, berpotensi besar mendorong transformasi potensi alam dan budaya menjadi sumber kesejahteraan yang lebih merata bagi warga kampung.

6. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan warga Kampung Mimika secara umum masih tergolong rendah. Rata-rata pendapatan rumah tangga berada di bawah Rp1.000.000 per bulan sehingga masih di bawah garis kemiskinan Kabupaten Mimika tahun 2025 yang

berada di kisaran Rp.1,16 juta per kapita per bulan, yang menunjukkan daya beli keluarga sangat terbatas dan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari masih rentan.

Secara spasial dan sosial, kondisi kesejahteraan antar RT maupun antar-kelompok warga relatif seragam dengan mayoritas penduduk hidup dalam situasi miskin, kecuali sebagian kecil penduduk pendatang yang memiliki usaha tetap seperti kios dan memperoleh pendapatan lebih stabil sehingga berada pada posisi ekonomi sedikit lebih baik dibanding warga asli kampung. Keberadaan kelompok usaha kecil ini memang tidak banyak, tetapi cukup memengaruhi dinamika ekonomi lokal karena mereka menjadi salah satu sumber penyedia barang dan perputaran uang di kampung.

Akses masyarakat terhadap layanan dasar juga masih terbatas. Tidak ada fasilitas pendidikan di dalam Kampung Mimika sehingga anak-anak harus berjalan kaki sekitar 10–15 menit ke sekolah di Apuri atau Kokonao, sementara untuk melanjutkan hingga jenjang lebih tinggi membutuhkan jarak dan biaya lebih besar. Layanan kesehatan dasar tidak hadir secara rutin di kampung dan fasilitas kesehatan terdekat berada di tingkat distrik, dengan ketiadaan transportasi umum reguler sehingga warga harus mengandalkan perahu atau tumpangan seadanya ketika sakit atau darurat.

Dalam hal konsumsi, sebagian besar rumah tangga memprioritaskan kebutuhan pangan sederhana, umumnya makan dua kali sehari dengan menu berbasis sagu, ikan, dan hasil kebun, sementara porsi untuk kebutuhan lain seperti sandang dan tabungan sangat terbatas. Biaya pendidikan dasar relatif tidak terlalu membebani karena adanya kebijakan sekolah gratis, namun biaya pendukung seperti seragam, alat tulis, dan uang saku tetap harus ditutupi dari pendapatan yang kecil.

Program perlindungan sosial seperti PKH, BLT, dan berbagai skema bantuan sosial sudah berjalan di Mimika, tetapi belum seluruh keluarga miskin di Kampung Mimika dapat terjangkau secara merata. Salah satu kendala utama adalah masih banyak warga yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan (*e-KTP* dan *KK*) sehingga tidak tercatat dalam basis data resmi penerima bantuan dan terlewat dalam penyaluran program.

Dalam rentang 5-10 tahun terakhir, perubahan kesejahteraan di Kampung Mimika cenderung lambat dan belum menunjukkan lonjakan berarti yang mampu mengangkat kondisi ekonomi secara kolektif. Meskipun data kabupaten mencatat

penurunan persentase penduduk miskin, tren penurunannya relatif datar dan masih menghadapi tantangan berat di wilayah pesisir yang jauh seperti Mimika, di mana faktor geografis, aksesibilitas rendah, dan sempitnya peluang usaha menjadi penghambat utama peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat.

G. Keamanan dan Ketertiban

1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan di Kampung Mimika secara umum tergolong aman dan terkendali, dengan insiden gangguan yang muncul hanya sesekali dan bersifat lokal tanpa pola berulang. Bentuk gangguan yang pernah terjadi biasanya berupa perkelahian antarwarga, perusakan ringan, atau konflik dalam rumah tangga yang bersumber dari persoalan internal keluarga. Konsumsi minuman beralkohol, baik minuman pabrikan maupun minuman lokal seperti bobo, menjadi salah satu faktor pemicu utama yang memengaruhi perilaku sebagian warga terutama kalangan muda sehingga sesekali menimbulkan kerawanan sosial di lingkungan kampung. Di sisi lain, kasus kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak memang pernah muncul, tetapi jumlahnya relatif kecil dan umumnya terkait tekanan rumah tangga, kecemburuan, atau kesulitan ekonomi yang dialami keluarga.

Gangguan yang bersumber dari alam tercatat dalam frekuensi yang rendah, misalnya ancaman ular atau buaya saat warga beraktivitas di sungai dan hutan, serta risiko terkena ulat atau hewan kecil lain ketika meramu hasil hutan. Walaupun jarang, kejadian semacam ini tetap menimbulkan rasa waswas bagi warga yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam di sekitar kampung. Secara umum, tidak ada bagian dari Kampung Mimika yang dikategorikan sebagai wilayah rawan keamanan; gangguan cenderung sporadis, tidak terikat musim atau waktu khusus, dan dapat segera diredam melalui keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan aparat terkait ketika diperlukan.

Kelompok yang paling rentan menjadi korban berbagai bentuk gangguan keamanan adalah anak muda yang terpapar konsumsi miras, perempuan dan anak yang berada dalam situasi rawan kekerasan domestik, serta warga yang bekerja di area sungai, hutan, dan pesisir. Faktor penyebab utamanya mencakup konsumsi alkohol

yang berlebihan, konflik emosional di dalam keluarga, kurangnya pengawasan terhadap anak muda, serta kondisi lingkungan yang berdekatan dengan habitat satwa liar. Dampaknya tampak dalam bentuk munculnya rasa takut dan ketidaknyamanan, sehingga warga menjadi lebih berhati-hati dalam beraktivitas di malam hari maupun di lokasi-lokasi tertentu. Meskipun demikian, berkat kuatnya jaringan sosial internal, dukungan tokoh adat dan agama, serta mekanisme penyelesaian masalah secara musyawarah yang masih berjalan, situasi keamanan dan ketertiban di Kampung Mimika secara keseluruhan tetap stabil dan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat sendiri.

2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban

Keamanan di Kampung Mimika pada dasarnya dikelola melalui struktur kelembagaan lokal yang menempatkan Hansip/Linmas sebagai ujung tombak penjaga ketertiban di tingkat kampung, yang kemudian diperkuat oleh keberadaan Koramil 1710-01/Kokonao dengan pos komando yang berlokasi di Atapo. Sinergi antara Linmas, aparat kampung, dan Koramil ini memberikan rasa aman bagi warga sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan skala kecil. Sebagian besar persoalan sosial yang muncul biasanya diselesaikan di tingkat lokal melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat kampung, dan unsur Linmas, dengan pendekatan cepat dan kekeluargaan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan tetap menjaga keharmonisan hubungan antarwarga.

Upaya pencegahan gangguan keamanan dilakukan dengan mendorong komunikasi sosial yang intens, patroli lingkungan dan pemantauan situasi oleh Linmas, serta peran aktif para tokoh masyarakat dalam memberikan himbauan terkait ketertiban, terutama menjelang dan saat kegiatan adat, acara yang berpotensi terkait konsumsi alkohol, maupun ketika terjadi perselisihan keluarga. Namun demikian, terdapat kendala struktural karena letak Polsek Mimika Barat berada cukup jauh, yaitu di Kampung Apuri, sehingga ketika terjadi insiden yang memerlukan penanganan langsung dari kepolisian, respons bisa terlambat akibat jarak dan akses. Keterbatasan ini membuat penguatan kapasitas keamanan lokal termasuk koordinasi yang erat dengan Koramil dan peningkatan kemampuan Linmas menjadi sangat penting agar

keamanan kampung tetap terjaga meskipun akses formal ke layanan kepolisian tidak selalu cepat.

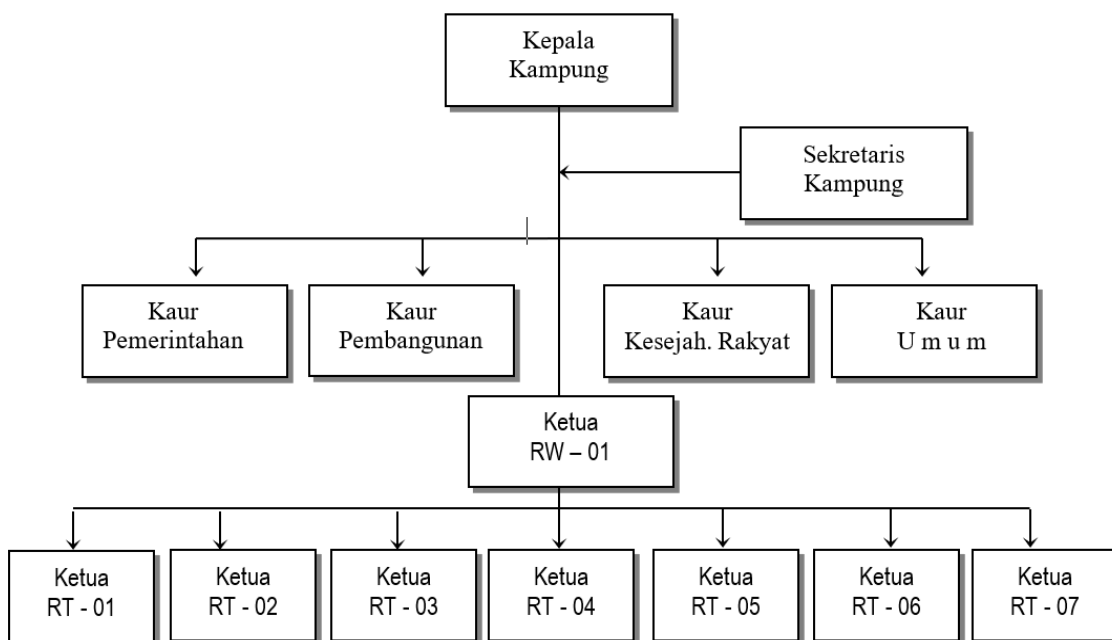
H. Kelembagaan Kampung

1. Lembaga Pemerintah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, Kampung Mimika dipimpin seorang Kepala Kampung, yaitu Thersisia Umarau, yang didampingi oleh Sekretaris Kampung, Bosco Orowaipuku, serta didukung perangkat struktural di tingkat urusan (Kaur). Posisi Kaur meliputi Kaur Keuangan dijabat Korneles Yakopeyauta, Kaur Pemerintahan Mikhael Onapiyaya, Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan oleh Petrus Wayarupukare, serta Kaur Perencanaan dan Umum oleh Longginus Akiriwapea.

Struktur Pemerintahan Kampung Mimika pada tahun 2025 yang menjalankan fungsi pelayanan dasar, pelaksanaan pembangunan, serta menjadi jembatan koordinasi dan komunikasi dengan warga di tingkat paling bawah sesuai struktur organisasi pemerintahan kampung yang berlaku sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Mimika

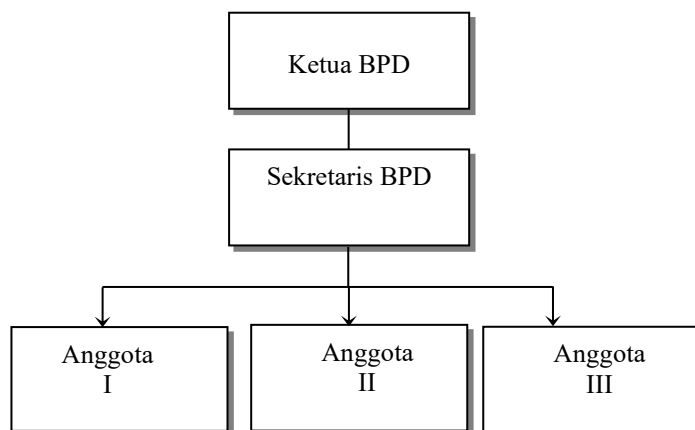


Di tingkat kewilayahan, pemerintahan kampung diperkuat oleh tujuh Ketua Rukun Tetangga (RT), masing-masing RT 1 dipimpin Enggel Take, RT 2 oleh

Marselus Badokapa, RT 3 oleh Rudi Akiriwapea, RT 4 oleh Maria Etha Take, RT 5 oleh Yulianus Umarau, RT 6 oleh Sakarias Tareyau, dan RT 7 oleh Feri Umarau.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra Kepala Kampung dalam proses pengambilan keputusan, dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur BPD Kampung Mimika



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra Kepala Kampung dalam proses pengambilan keputusan, terdiri dari Ketua (Norbertus Umarau), Sekretaris (Yuliana Wuwuyuta), dengan 3 orang Anggota-1 (Karel Wandini), Anggota-2 (Yudas Tonami) dan Anggota-3 (Yohanes Materani).

2. Lembaga Kemasyarakatan

Kampung Mimika memiliki jaringan kelembagaan sosial yang berperan penting dalam menjaga kerukunan dan kekompakan warga. Lembaga adat masih menjadi rujukan utama dalam mengatur norma hidup bersama, menyelesaikan perselisihan skala kecil, serta memelihara nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Tokoh-tokoh adat tetap dihormati, terutama ketika menyangkut hubungan antarwarga, pelestarian tradisi, dan penguatan identitas komunitas, sehingga walaupun bergerak di ranah sosial-kultural, lembaga adat menjadi salah satu penopang utama stabilitas sosial di tingkat kampung.

Di sisi lain, lembaga keagamaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mayoritas warga Kampung Mimika beragama Katolik dan tergabung dalam dua Komunitas Basis (Kombas), yakni Kombas Santa Monika dan Kombas Santo Emanuel, yang berada di bawah naungan Gereja Paroki Maria Bintang Laut Kokonao. Kombas berfungsi sebagai wadah pembinaan iman sekaligus ruang penguatan relasi sosial melalui ibadah rutin, ibadah sabda, pertemuan doa, serta kegiatan khusus seperti doa rosario pada bulan Mei dan devosi kepada Maria pada bulan Oktober, dengan tingkat keterlibatan umat yang tinggi sehingga memperlihatkan kuatnya rasa solidaritas dan kebersamaan.

Kerja sama antara lembaga adat, lembaga keagamaan, dan pemerintah kampung terbangun cukup baik, terutama dalam pelaksanaan program sosial-keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan lain di tingkat lokal. Pemerintah kampung memberikan dukungan terhadap aktivitas Kombas dan kegiatan gerejawi lainnya karena dipandang berperan besar dalam menanamkan nilai moral, membina ketertiban sosial, dan memperkuat karakter warga, sementara lembaga adat ikut menjaga agar pembangunan kampung tetap selaras dengan nilai dan hak masyarakat adat. Sinergi antar kelembagaan ini berdampak nyata bagi kehidupan warga, membantu menciptakan lingkungan yang rukun, saling menghargai, dan saling menopang; secara keseluruhan, keberadaan lembaga adat dan keagamaan menjadi fondasi utama ketahanan sosial serta penggerak berbagai kegiatan kolektif yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Mimika.

3. Lembaga Politik

Warga Kampung Mimika memperlihatkan perilaku politik yang relatif dewasa dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024. Masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya secara sadar dan tertib, menunjukkan bahwa kesadaran politik di kampung ini terus tumbuh dan diikuti dengan komitmen untuk terlibat dalam proses demokrasi di tingkat lokal.

Penyelenggaraan pemilu di Kampung Mimika berlangsung tertib dan aman berkat kerja sama yang solid antara KPU Mimika, PPD Distrik Mimika Barat, KPPS setempat, pemerintah kampung, tokoh adat, dan perwakilan partai politik. Koordinasi yang baik di antara para pihak tersebut membantu menciptakan iklim pemilu yang

kondusif, memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai aturan, serta memperkuat kepercayaan warga terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan transparansi di tingkat kampung.

I. Sarana dan Prasarana

1. Transportasi dan Komunikasi

Jaringan transportasi di Kampung Mimika didominasi oleh jalur air dan akses pejalan kaki yang menghubungkan antar permukiman di pesisir. Moda transportasi utama warga adalah perahu dan kapal bermesin (*longboat*) untuk menuju kampung lain maupun distrik, sedangkan akses transportasi udara tersedia melalui landasan (*airstrip*) yang berlokasi di Apuri sebagai pusat layanan bagi kawasan Mimika Barat. Di dalam kampung, mobilitas harian antar rumah dan menuju fasilitas umum lebih banyak dilakukan dengan berjalan kaki karena jarak antarkampung di distrik ini relatif dekat, sehingga konektivitas antar kampung dapat ditempuh sekitar 10–15 menit berjalan kaki tanpa kendaraan bermotor.



Transportasi darat kampung (dok.ippm)

Sarana jalan darat di Kampung Mimika masih terbatas dan bersifat lokal. Jalan utama kampung berupa jalan *paving block* sepanjang kurang lebih 500 meter yang membelah kawasan permukiman dan menjadi koridor penghubung ke kampung-kampung lain di Distrik Mimika Barat, namun sebagian ruasnya sudah rusak akibat banjir rob dan genangan saat puncak gelombang dan musim hujan, terutama sekitar bulan Desember. Selain itu terdapat jalan titian dari semen sepanjang sekitar 200 meter yang dibangun pemerintah kampung menggunakan Dana Desa, serta jembatan-jembatan kayu yang menghubungkan rumah-rumah warga dengan dermaga atau tambatan perahu di



Transportasi laut penduduk (dok.ippm)

belakang kampung, karena usia pemakaiannya sudah lama dan bahan kayu terpapar pasang surut, banyak titik pada jembatan dan dermaga ini yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.

Transportasi umum dalam arti trayek reguler angkutan darat belum berkembang, sehingga pergerakan orang dan barang bergantung pada perahu pribadi, *longboat* milik warga, atau kapal rakyat yang datang tidak terjadwal. Keterhubungan antar kampung dan dengan pusat distrik tetap dapat dijalankan berkat kedekatan jarak dan penggunaan perahu bermesin, namun pada saat cuaca buruk dan gelombang tinggi akses ini menjadi terkendala, terutama untuk perjalanan ke Timika yang memerlukan biaya sewa perahu cukup besar dan bergantung kondisi laut.

Dalam hal komunikasi, Kampung Mimika telah terlayani sinyal seluler dari operator Telkomsel, yang menjadi tulang punggung komunikasi telepon dan data warga sehari-hari. Namun, kualitas sinyal sangat dipengaruhi ketersediaan listrik. Pada jam-jam ketika aliran listrik padam, sinyal Telkomsel juga melemah atau hilang sehingga akses komunikasi terputus sementara, kondisi ini menggambarkan ketergantungan tinggi jaringan seluler pada infrastruktur energi lokal. Untuk mengatasi keterbatasan ini, pemerintah distrik menyediakan akses wifi gratis berbasis satelit (*Starlink*) di titik di pusat pemerintahan distrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sementara sebagian warga atau pelaku usaha juga memasang layanan wifi berbayar skala kecil guna memenuhi kebutuhan akses internet untuk komunikasi, pendidikan, maupun layanan digital lainnya.



Penduduk memanfaatkan jaringan internet (dok.ippm)

2. Air Bersih dan Sanitasi

Sumber air bersih utama bagi warga Kampung Mimika adalah air hujan yang ditampung di rumah-rumah untuk kebutuhan minum dan mandi, sementara sumur galian yang ada lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga. Tidak terdapat jaringan layanan air perpipaan seperti PDAM atau PAK yang menjangkau kampung ini, sehingga ketergantungan masyarakat pada curah hujan sangat tinggi, terutama pada musim kemarau yang panjang.

Secara praktik, air hujan yang akan dikonsumsi sebagai air minum terlebih dahulu direbus oleh warga untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, mengingat air hujan yang tertampung masih berpotensi mengandung debu, bakteri, dan patogen lain jika tidak dikelola dengan benar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum alternatif sepanjang diolah terlebih dahulu melalui pemasakan atau teknologi pengolahan sederhana, namun penggunaan jangka panjang tetap perlu diimbangi dengan peningkatan akses air bersih yang lebih terjamin kualitasnya. Sistem distribusi air di Kampung Mimika saat ini mengandalkan bak-bak penampung di rumah atau titik komunal, dan di beberapa titik sudah terpasang jaringan pipa yang direncanakan menyalurkan air ke rumah-rumah, tetapi instalasi tersebut belum berfungsi karena menunggu peresmian dan pengoperasian resmi oleh pemerintah daerah.

Kondisi sanitasi lingkungan di kampung masih tergolong rendah. Sebagian warga memanfaatkan WC umum dengan kondisi yang tidak layak, ditandai lantai dan ruangan yang kotor, tidak tersedianya air bersih di dalam fasilitas, serta ketiadaan *septic tank*, limbah buang air dialirkan langsung ke area rawa tergenang di bawah bangunan. Saat terjadi banjir rob, genangan ini bercampur dengan air laut dan material lain di sekitarnya, sehingga meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan penularan penyakit berbasis air dan lingkungan.

Pengelolaan sampah di Kampung Mimika juga belum teratur, tidak tersedia TPS maupun sistem pengangkutan rutin, sehingga banyak warga membuang sampah di sekitar rumah, ke rawa, atau membiarkan menumpuk dengan harapan akan terbawa arus ketika banjir rob datang dan masuk ke sungai atau laut. Pola ini mencerminkan belum adanya tata kelola sampah yang memadai dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, mengotori kawasan pesisir, serta mengganggu ekosistem perairan yang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat.

Dari sisi drainase, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kampung Mimika praktis belum memiliki sistem drainase yang terbangun dengan baik. Ketidadaan saluran resmi membuat air hujan dan air pasang mudah menggenang di titik-titik rendah pemukiman, sehingga memperparah kerentanan terhadap banjir rob dan genangan berkepanjangan, terutama pada musim hujan dan puncak gelombang.

Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan perbaikan terpadu di bidang air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan drainase sebagai satu paket upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat Kampung Mimika.

3. Penerangan / Energi

Sumber listrik utama di Kampung Mimika berasal dari jaringan PLN yang sudah menjangkau seluruh rumah tangga, sehingga setiap KK pada dasarnya telah teraliri listrik. Sebagian kecil warga memiliki genset pribadi, tetapi penggunaannya hanya untuk keperluan mendesak ketika listrik padam atau ada kebutuhan khusus, bukan untuk pemakaian harian karena biaya bahan bakar yang tinggi.

Layanan listrik PLN di kampung beroperasi terbatas, umumnya menyala mulai sekitar pukul 18.00 hingga pukul 06.00 WIT, sehingga warga baru dapat menikmati penerangan dan menggunakan peralatan elektronik pada malam hingga dini hari. Pada situasi tertentu seperti banjir rob yang masuk ke area mesin atau jaringan (misalnya sekitar pukul 02.00 pagi), listrik akan dipadamkan lebih cepat untuk mencegah kerusakan instalasi dan mengurangi risiko gangguan keselamatan. Kondisi jaringan sendiri belum stabil, pemadaman masih kerap terjadi mengikuti gangguan di sistem PLN tingkat distrik maupun faktor teknis lokal, sehingga ketersediaan listrik tidak selalu bisa diandalkan sepanjang jam layanan yang dijadwalkan.

Karena semua rumah sudah terhubung ke jaringan PLN, kesenjangan akses listrik antar rumah tangga relatif kecil dan perbedaan utama lebih terletak pada kepemilikan peralatan listrik (lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, dan sebagainya). Tidak ada alternatif sumber energi lain yang berkembang secara signifikan di Kampung Mimika seperti



panel surya rumah tangga, baterai portable skala besar, maupun pembangkit energi terbarukan lain seperti PLTS komunal atau mikrohidro belum tersedia di kampung ini. Kondisi ini membuat masyarakat sangat bergantung pada pasokan PLN dan menjadikan peningkatan keandalan jaringan listrik sebagai kebutuhan penting untuk mendukung kegiatan belajar anak, pelayanan sosial, dan aktivitas ekonomi pada malam hari.

4. Pendidikan

Di Kampung Mimika sendiri tidak tersedia satu pun unit layanan pendidikan formal, baik PAUD/TK, SD, SMP, maupun SMA/SMK, karena seluruh fasilitas sekolah dipusatkan di ibu kota distrik (Kokonao) dan Kampung Apuri sebagai sentra pendidikan wilayah Mimika Barat. Penempatan sekolah di dua lokasi tersebut membuat Kampung Mimika berada dalam posisi “wilayah layanan”, di mana anak-anak harus keluar kampung untuk dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah.

Meskipun demikian, akses fisik menuju sekolah masih tergolong terjangkau bagi warga Kampung Mimika. Jarak dari permukiman ke sekolah-sekolah di Apuri dan Kokonao dapat ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 10-15 menit, sehingga anak-anak tidak memerlukan moda transportasi khusus dan cukup menggunakan jaringan jalan kampung serta titian yang sudah ada. Kondisi ini membuat ketiadaan sekolah di dalam kampung relatif dapat dikompensasi oleh kedekatan jarak, walaupun dari sisi kenyamanan dan kualitas layanan pendidikan tetap diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sarana antara kampung dan pusat distrik.

5. Kesehatan

Kampung Mimika belum memiliki fasilitas kesehatan sendiri, sehingga warga sepenuhnya bergantung pada layanan kesehatan yang berada di Kampung Apuri dan Puskesmas Kokonao sebagai rujukan utama di Distrik Mimika Barat. Di tingkat kampung tidak terdapat layanan posyandu tetap, puskesmas pembantu, maupun pos bidan yang beroperasi setiap hari. Pelayanan lebih banyak diakses masyarakat dengan datang langsung ke fasilitas di puskesmas yang terdapat di kampung Apuri atau menunggu kunjungan berkala dari tenaga kesehatan ketika ada program tertentu dari puskesmas atau lembaga mitra.

6. Ekonomi

Aktivitas ekonomi utama masyarakat Kampung Mimika bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan sungai, dengan kombinasi mata pencaharian sebagai nelayan tradisional (menangkap ikan, udang, kepiting bakau), pengolah sagu, serta penggarap kebun dan peramu hasil hutan untuk kebutuhan pangan dan sedikit jual beli. Sebagian kecil warga terlibat dalam usaha perdagangan kecil dan jasa, misalnya membuka lapak pinang atau berjualan kebutuhan harian di pasar kampung, sementara UMKM, kerajinan, dan usaha modern lainnya masih berkembang dalam skala sangat terbatas.



Hasil Kerajinan Penduduk (dok.ippm)

Basis sumber daya alam kampung meliputi hutan rawa dan mangrove, perairan sungai dan pesisir, dusun sagu, serta kebun-kebun campuran di sekitar permukiman yang menyediakan sagu, umbi-umbian, sayuran lokal, dan buah-buahan. Ekosistem ini menjadi penyangga utama ketahanan pangan dan sumber penghasilan, meskipun rentan terhadap perubahan musim, pasang surut, dan tekanan lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tetap berkelanjutan.

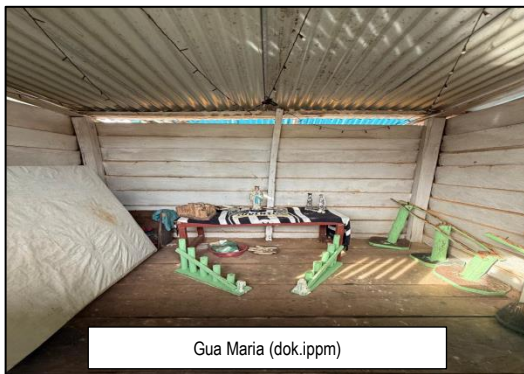
Fasilitas perdagangan di Kampung Mimika masih sederhana, terdapat kios milik pendatang, pasar kampung, serta lapak-lapak musiman seperti penjualan pinang dan hasil kebun, sementara sebagian besar barang kebutuhan (beras, minyak, gula, dan produk pabrikan) masih dipasok dari luar, terutama dari Timika.

7. Peribadatan

Kampung Mimika sendiri tidak memiliki bangunan rumah ibadah, sehingga seluruh kegiatan keagamaan umat terpusat di kampung sekitar, terutama Migiwia, Kokonao, dan Apuri. Di kawasan ini berdiri gereja Katolik (antara lain Paroki Maria Bintang Laut di Kokonao), gereja-gereja Protestan, serta masjid yang melayani umat Muslim, sehingga warga Kampung Mimika harus berpindah kampung untuk mengikuti ibadah mingguan dan kegiatan rohani lainnya. Bangunan-bangunan gereja dan masjid di pusat distrik dan kampung tetangga umumnya dalam kondisi layak

pakai, permanen, dan memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung umat dari beberapa kampung di distrik ini.

Kegiatan keagamaan rutin berjalan cukup aktif dan menjadi salah satu poros kehidupan sosial masyarakat. Umat Katolik dan Protestan mengikuti ibadah Minggu,



sekolah minggu untuk anak-anak, kelompok doa lingkungan, dan doa rosario, sedangkan umat Muslim menjalankan shalat berjemaah dan ibadah Jumat serta kegiatan pengajian yang terpusat di Kokonao. Pada hari-hari besar keagamaan, gereja dan masjid berfungsi

sebagai titik kumpul warga dari berbagai kampung, sehingga selain sebagai tempat ibadah, rumah-rumah ibadah ini juga menjadi ruang pertemuan sosial dan penguatan identitas komunitas pesisir Mimika.

Lembaga keagamaan memegang peran penting di luar fungsi liturgis semata. Gereja dan jemaat sering terlibat dalam dukungan sosial bagi keluarga miskin, pendidikan moral anak dan remaja (melalui katekese, sekolah minggu, dan pendampingan kaum muda), serta penggalangan kegiatan sosial seperti kerja bakti dan mediasi konflik kecil antarwarga. Peran ini membantu mengisi kekosongan layanan formal di kampung, memperkuat solidaritas, dan mendorong sikap saling menghormati antaragama, karena warga Kampung Mimika baik Katolik, Protestan, maupun Muslim berbagi ruang hidup dan saling berinteraksi melalui jaringan keluarga, tetangga, dan aktivitas sosial sehari-hari.

8. Olahraga dan Rekreasi

Fasilitas olahraga dan rekreasi di Kampung Mimika masih sangat minim. Tidak terdapat lapangan olahraga khusus seperti lapangan sepak bola, voli, basket, maupun futsal yang dibangun secara permanen. Aktivitas fisik warga, terutama anak-anak dan pemuda, umumnya dilakukan secara informal di ruang-ruang terbuka seadanya seperti halaman rumah atau area kosong di sekitar kampung. Demikian pula, fasilitas rekreasi seperti taman kampung, ruang terbuka publik yang tertata, maupun titik pantai/spot wisata yang dikelola khusus belum tersedia, sehingga ruang berkumpul warga lebih

banyak bersifat fungsional dan tidak didesain sebagai sarana olahraga atau rekreasi bersama.

Kegiatan pemuda dan komunitas seni budaya di tingkat kampung berjalan dalam skala terbatas dan lebih banyak terhubung dengan kegiatan lintas kampung atau acara yang dipusatkan di distrik, karena di Kampung Mimika belum terdapat sanggar seni, gelanggang bela diri, maupun wadah kreativitas yang terorganisir secara formal. Event kampung seperti festival budaya, perlombaan olahraga, atau pertandingan antar RT belum menjadi agenda rutin di tingkat lokal. Ketika ada festival budaya, lomba tari Seka, atau lomba dayung tradisional yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, pesertanya umumnya direkrut dari berbagai kampung pesisir dan kegiatan dipusatkan di lokasi lain seperti Poumako

BAGIAN IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG

A. Infrastruktur Kampung Rasa Kota

Konsep infrastruktur kampung berstandar kota selaras dengan paradigma “membangun dari kampung ke kota”, yang menempatkan kampung sebagai fondasi pertumbuhan dengan memperkuat kualitas infrastrukturnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Gagasan membangun kampung rasa kota menjadi wujud praktisnya, yaitu menghadirkan pelayanan, kenyamanan dan aksesibilitas setara perkotaan tanpa menghilangkan identitas sosial, budaya dan kearifan lokal.

Kebutuhan infrastruktur kampung rasa kota di kampung Mimika pada tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota
Di Kampung Mimika

No	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Akses air bersih dan sambungan pipa rumah	Sekitar 70% rumah tangga belum terhubung ke jaringan pipa, sehingga distribusi air bersih belum merata di seluruh kampung.	Penyelesaian sambungan rumah (SR) bagi seluruh unit rumah, peningkatan kapasitas suplai, dan pemastian kontinuitas aliran air bersih ke warga.	Dinas PUPR (Cipta Karya)
2.	Hunian layak dan rumah sehat	Beberapa kepala keluarga masih tinggal menumpang di rumah orang tua atau kerabat sehingga kepemilikan rumah layak mandiri masih terbatas.	Pembangunan rumah sehat, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), dan fasilitasi program stimulan rumah swadaya bagi keluarga sasaran.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3.	Sanitasi layak dan higienis	Fasilitas sanitasi dasar sudah ada, tetapi praktik dan kualitas higienitas belum merata di seluruh rumah tangga.	Pembangunan jamban sehat, peningkatan sanitasi rumah tangga, serta pengelolaan limbah domestik skala sederhana berbasis kampung.	Dinas Kesehatan, Dinas PUPR (Cipta Karya).
4.	Penerangan listrik 24 jam	Listrik kampung saat ini hanya menyala sekitar 12 jam per hari sehingga aktivitas malam warga masih terbatas.	Peningkatan daya, perluasan jaringan listrik, dan pengembangan layanan listrik 24 jam penuh untuk seluruh permukiman.	PLN UP3 Timika, Dinas ESDM.

5.	Jalan kampung dan konektivitas permukiman	Jalan poros utama sudah baik, namun beberapa segmen jalan lingkungan antarpermukiman belum tersambung dan drainase belum optimal.	Penyambungan seluruh ruas jalan lingkungan kampung dan perbaikan drainase untuk memperlancar mobilitas warga dan angkutan hasil.	Dinas PUPR, Distrik Mimika Barat, Pemerintah Kampung.
6.	Ruang publik taman mangrove	Kawasan mangrove di sekitar kampung belum ditata sebagai ruang terbuka hijau dan ruang publik warga.	Penataan taman mangrove sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk edukasi lingkungan sekaligus ruang rekreasi masyarakat.	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Distrik Mimika Barat.
7.	Jaringan internet kampung Mimika	Jaringan internet di kampung masih terbatas sehingga akses informasi dan layanan digital belum optimal.	Penambahan dan perluasan jaringan internet di seluruh kawasan permukiman untuk mendukung layanan publik, pendidikan, dan ekonomi digital kampung.	Dinas Kominfo, provider telekomunikasi, Distrik/Kampung.
8.	Sumur galian/sumur bor	Sebagian wilayah kampung masih mengandalkan sumber air terbatas, terutama saat musim kemarau atau gangguan suplai jaringan utama.	Penambahan sumur galian/sumur bor pada titik-titik strategis untuk memperkuat cadangan dan akses air bersih rumah tangga, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa secara optimal.	Dinas PUPR (Cipta Karya), Pemerintah Kampung, Distrik Mimika Barat

Sumber: Hasil FGD, 2025

B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu memperkuat aktivitas ekonomi sejak level kampung agar menjadi fondasi pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, potensi unggulan didorong untuk dikelola secara lebih profesional dengan dukungan fasilitas yang setara standar perkotaan mulai dari akses pasar modern, fasilitas penyimpanan layak, hingga pendampingan kelembagaan dan legalitas usaha tanpa menghilangkan identitas budaya dan nilai komunal masyarakat.

Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal di kampung Mimika pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

**Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal
Di kampung Mimika**

No	Komponen Infrastruktur/ Ekonomi	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Perikanan lokal (ikan, udang, kepiting)	Perikanan menjadi sumber nafkah utama, namun menghadapi fluktuasi harga, akses pasar yang sempit, dan pemanfaatan cold storage yang belum optimal.	Pelatihan penanganan pascapanen, optimalisasi penggunaan <i>cold storage</i> , penyediaan modal bergulir dan sarana tangkap sederhana, serta fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha perikanan.	Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, Distrik Mimika Barat.
2.	UMKM pangan lokal berbasis sagu	Usaha olahan sagu masih berskala kecil, terbatas peralatan produksi, minim pendampingan, dan akses pasar masih sempit.	Pelatihan pengembangan produk turunan sagu, penyediaan alat pengolahan, penguatan kelembagaan UMKM, fasilitasi legalitas usaha (PIRT, sertifikasi halal), serta perluasan pemasaran melalui marketplace dan toko modern.	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan, DPMK.
3.	Hasil kebun (sagu)	Hasil kebun sudah diusahakan warga, namun masih didominasi penjualan mentah dengan nilai tambah dan jangkauan pasar yang terbatas.	Penguatan budidaya tanaman unggulan, dukungan sarana produksi, pengembangan olahan hasil kebun, dan fasilitasi akses pasar ke kota serta jejaring lembaga penampung.	Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Distrik/Kampung.
4.	Hasil kerajinan (ukiran patung dan kerajinan lain)	Kerajinan ukiran patung sudah dikenal, tetapi masih dikelola sederhana, belum memiliki dukungan desain, kemasan, dan akses promosi yang kuat.	Pelatihan peningkatan kualitas desain dan <i>finishing</i> , dukungan peralatan sederhana, fasilitasi promosi melalui pameran dan <i>platform digital</i> , serta penguatan kelembagaan kelompok perajin.	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, DPMK, Distrik/Kampung.

Sumber: Hasil FGD, 2025

C. SDM, Budaya dan Lingkungan Berkelanjutan

Penguatan SDM, budaya dan lingkungan berkelanjutan merupakan inti dari konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu

menghadirkan kualitas hidup modern tanpa meninggalkan jati diri lokal. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian nilai budaya, dan pengelolaan lingkungan yang sehat, kampung dapat tumbuh layak, maju, dan berdaya saing, namun tetap berakar pada kearifan lokal dan harmoni alam.

Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan di kampung Mimika pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan
Di kampung Mimika

No	Komponen SDM/ Budaya/Lingkungan	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Pendidikan dasar dan guru	Kualitas pendidikan dasar masih terbatas, sebagian guru berstatus honorer daerah dan sarana prasarana sekolah belum memadai.	Peningkatan kualifikasi dan status guru (menuju P3K), rehabilitasi dan penambahan ruang kelas, pembangunan jembatan penghubung menuju sekolah agar akses siswa lebih aman.	Dinas Pendidikan, BKPSDM, Dinas PUPR, Distrik Mimika Barat, Pemerintah Kampung
	Posyandu dan 1000 HPK	Layanan posyandu masih lemah dari sisi jumlah dan kapasitas kader, ketersediaan alat, serta dukungan gizi sehingga pemantauan 1000 HPK belum optimal.	Peningkatan kapasitas kader posyandu, pengadaan alat pemantau tumbuh kembang, dan penguatan program gizi bagi ibu hamil dan balita di Kampung Mimika.	Dinas Kesehatan, DPMK, Distrik Mimika Barat, Pemerintah Kampung
2.	Budaya dan sanggar seni pemuda	Kegiatan budaya pemuda masih berlangsung sederhana dengan fasilitas pendukung yang terbatas.	Pembangunan atau revitalisasi sanggar seni, penyediaan peralatan seni budaya, serta pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan rutin bagi pemuda untuk memperkuat identitas budaya dan kohesi sosial kampung.	Dinas Pariwisata/Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, DPMK, Distrik/Kampung
3.	Beasiswa untuk anak sekolah	Masih terdapat anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang berisiko putus sekolah atau kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.	Penyediaan dan perluasan program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, termasuk bantuan perlengkapan sekolah dan dukungan biaya pendidikan menengah/lanjutan.	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPMK, Distrik/Kampung

4.	Dukungan bagi lembaga adat Kampung Mimika	Lembaga adat sudah ada, namun kapasitas kelembagaan dan dukungan pendanaan masih terbatas untuk menjalankan peran pelestarian budaya dan mediasi sosial.	Pemberian bantuan dana operasional dan penguatan kapasitas bagi lembaga adat untuk mendukung pelestarian budaya, penyelesaian masalah sosial, dan penguatan tata kelola adat di kampung.	DPMK, Dinas Pariwisata/Kebudayaan, Distrik Mimika Barat, Pemerintah Kampung
5.	Pengaktifan kembali LINMAS dan Poskamling	LINMAS dan Poskamling belum berfungsi optimal sehingga sistem keamanan lingkungan berbasis warga belum berjalan secara rutin.	Pengaktifan kembali dan penguatan LINMAS serta Poskamling melalui pembinaan, dukungan peralatan sederhana, dan penjadwalan ronda rutin berbasis kesepakatan warga.	Satpol PP, Kepolisian, Distrik Mimika Barat, Pemerintah Kampung
6.	Penambahan personel TNI dan POLRI di Distrik	Jumlah personel TNI dan POLRI di wilayah distrik masih terbatas dibanding luas wilayah dan jumlah kampung.	Advokasi penambahan personel TNI dan POLRI di Distrik Mimika Barat untuk memperkuat keamanan wilayah dan dukungan pembinaan masyarakat, termasuk kampung-kampung pesisir seperti Kampung Mimika.	Kodim/Koramil, Polres/Polsek, Pemerintah Kabupaten, Distrik Mimika Barat
7.	Penambahan alat musik di gereja	Kegiatan ibadah dan pelayanan rohani telah berjalan, namun fasilitas alat musik gereja masih terbatas untuk mendukung pelayanan dan pembinaan jemaat.	Pengadaan atau penambahan alat musik gereja guna menunjang kegiatan ibadah, pembinaan rohani, dan aktivitas kepemudaan berbasis gereja di kampung.	Lembaga keagamaan/gereja, Bimas Kristen/Kantor Kementerian Agama, DPMK, Pemerintah Kampung

Sumber: Hasil FGD, 2025

BAGIAN V. PENUTUP

Kampung Mimika di Distrik Mimika Barat merupakan komunitas yang memiliki kekayaan potensi alam dan budaya, sekaligus menampilkan dinamika sosial yang unik. Infrastruktur kampung terus diarahkan mendekati standar wilayah perkotaan melalui pengembangan jalan poros dan jalan lingkungan, peningkatan akses air bersih, penerangan, serta penataan fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau dan sarana pendidikan. Namun saat ini sejumlah tantangan masih menonjol, terutama terkait ketersediaan hunian layak, kualitas sanitasi, dan keterjangkauan layanan dasar, sehingga aspek-aspek tersebut tetap menjadi fokus utama agenda pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah bersama masyarakat.

Di bidang ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia, warga Kampung Mimika memiliki potensi produktif yang kuat, khususnya pada sektor perikanan lokal serta usaha mikro berbasis pangan lokal seperti olahan sagu. Penguatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar dan permodalan menjadi krusial agar potensi tersebut dapat benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada saat yang sama, pembinaan moral dan spiritual lewat pendidikan keagamaan, serta pengembangan keterampilan dan seni bagi pemuda, menunjukkan adanya upaya menjaga identitas lokal sambil membangun kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan kompetitif.

Secara keseluruhan, Kampung Mimika berada dalam proses transformasi menuju kampung yang modern, layak huni, dan produktif, tanpa melepaskan jati diri serta nilai budaya lokal yang telah lama mengakar. Pendekatan pembangunan yang berlandaskan prinsip membangun dari kampung ke kota dan mewujudkan kampung rasa kota menekankan integrasi antara penguatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, peningkatan layanan pendidikan, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga, Kampung Mimika diharapkan dapat tampil sebagai contoh kampung yang maju dan inklusif, yang mampu memadukan kemajuan modern dengan kearifan lokal secara harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Mimika dalam Angka Tahun 2024*, Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Distrik Mimika Barat dalam Angka Tahun 2024*, Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2025). *Data Agregat Kependudukan (Semester I Tahun 2025)*. Dinas Dukcapil, Timika
- Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.